

**TIGA ORGANISASI MASYARAKAT MITRA KEMHAN DAN
KESADARAN BELA NEGARA: ANTARA HARAPAN, TANTANGAN,
DAN TEMUAN LAPANGAN SOSIOLOGI PERTAHANAN**

(Skripsi)

Oleh

TSANIA KHOLIZA NUR PUTRI

2216011080



**JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2026

**TIGA ORGANISASI MASYARAKAT MITRA KEMHAN DAN
KESADARAN BELA NEGARA: ANTARA HARAPAN, TANTANGAN
DAN TEMUAN LAPANGAN SOSIOLOGI PERTAHANAN**

Oleh

TSANIA KHOLIZA NUR PUTRI

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA SOSIOLOGI**

Pada

**Jurusam Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2026

ABSTRAK

TIGA ORGANISASI MASYARAKAT MITRA KEMHAN DAN KESADARAN BELA NEGARA: ANTARA HARAPAN, TANTANGAN, DAN TEMUAN LAPANGAN SOSIOLOGI PERTAHANAN

Oleh

TSANIA KHOLIZA NUR PUTRI

Kesadaran bela negara di Indonesia pada era kontemporer masih menghadapi berbagai tantangan, seperti penyempitan pemaknaan yang cenderung militeristik serta rendahnya keterlibatan masyarakat dalam pertahanan non-militer. Kondisi ini mendorong Kementerian Pertahanan melalui Program Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) untuk menjalin kemitraan dengan organisasi masyarakat. Penelitian ini menganalisis peran organisasi masyarakat dalam pelaksanaan PKBN serta mengkaji harapan, tantangan, dan pemaknaan nilai bela negara dalam praktik organisasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi nonpartisipatif, dan dokumentasi terhadap dua belas informan dari tiga organisasi masyarakat mitra Kemhan, yaitu FKBN, PPBN, dan GMBN. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan kerangka teori konstruksi sosial Berger dan Luckmann (1966). Hasil penelitian menunjukkan bahwa organisasi masyarakat berperan dalam sosialisasi nilai bela negara, penguatan kemitraan, serta pembentukan disiplin dan komitmen kader, dengan dukungan harapan berupa penguatan pembinaan, pendanaan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Di sisi lain, pelaksanaan program masih menghadapi tantangan berupa kesalahpahaman dan disinformasi, rendahnya minat generasi muda, serta pengaruh globalisasi terhadap nilai nasionalisme. Penelitian ini menunjukkan bahwa nilai bela negara tidak hanya dibentuk melalui kebijakan negara, tetapi juga dikonstruksi secara sosial dalam praktik organisasi masyarakat.

Kata Kunci: Kesadaran Bela Negara, Organisasi Masyarakat, Program Pembinaan Kesadaran Bela Negara(PKBN), Pemaknaan Bela Negara

ABSTRACT

THREE PARTNER ORGANIZATIONS OF THE MINISTRY OF DEFENSE AND STATE DEFENSE AWARENESS: BETWEEN EXPECTATIONS, CHALLENGES, AND FIELD FINDINGS IN THE SOCIOLOGY OF DEFENSE

By

TSANIA KHOLIZA NUR PUTRI

State defense awareness in Indonesia in the contemporary era continues to face various challenges, including a narrowing interpretation that tends to be militaristic and low public participation in non-military defense efforts. This condition has encouraged the Ministry of Defense, through the State Defense Awareness Development Program (PKBN), to establish partnerships with civil society organizations. This study analyzes the role of civil society organizations in the implementation of PKBN and examines their expectations, challenges, and the meaning of state defense values in organizational practices. The study employs a qualitative approach using in-depth interviews, non-participant observation, and documentation involving twelve informants from three partner organizations of the Ministry of Defense FKBN, PPBN, and GMBN. Data analysis was conducted through data reduction, data display, and conclusion drawing using the social construction theory framework by Berger and Luckmann (1966). The findings show that civil society organizations play a role in disseminating state defense values, strengthening partnerships, and fostering discipline and commitment among members, supported by expectations for improved institutional guidance, funding, and human resource capacity building. However, the implementation of the program still faces several challenges, including misunderstandings and misinformation regarding the concept of state defense, low interest among younger generations, and the influence of globalization on national values. This study concludes that state defense values are not only shaped through state policies but are also socially constructed through the practices of civil society organizations.

Keywords: State Defense Awareness, Civil Society Organizations, State Defense Awareness Development Program (PKBN), Interpretation of State Defense Values.

**Judul Skripsi : TIGA ORGANISASI MASYARAKAT
MITRA KEMHAN DAN KESADARAN
BELA NEGARA: ANTARA HARAPAN,
TANTANGAN DAN TEMUAN LAPANGAN
SOSIOLOGI PERTAHANAN**

Nama Mahasiswa : Tsania Kholiza Nur Putri

Nomor Pokok Mahasiswa : 2216011080

Jurusan : Sosiologi

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Dr. Bartoven Vivit Nurdin, M.Si.

NIP. 19770401 200501 2 003

2. Ketua Jurusan Sosiologi

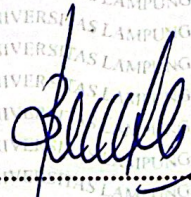
Dr. Bartoven Vivit Nurdin, M.Si.

NIP. 19770401 200501 2 003

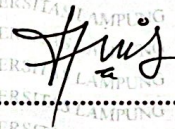
MENGESAHKAN

1. **Tim Penguji**

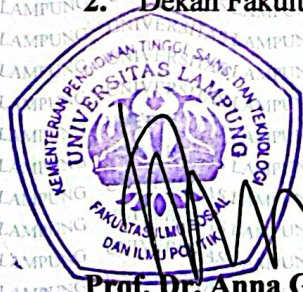
Ketua : Dr. Bartoven Vivit Nurdin, M.Si.



Penguji Utama : Azis Amriwan, S.Sos., M.Si.



2. **Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.

NIP. 19760821 200003 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 8 April 2026



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 8 April 2026

Yang membuat pernyataan,



Tsania Kholiza Nur Putri

NPM. 2216011080

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Tsania Kholiza Nur Putri, lahir di Kampung Baru, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung pada 7 Desember 2004. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, dari pasangan Almarhum Bapak Ahmad Syaifullah dan Ibu Yusniati. Penulis memiliki seorang kakak bernama Khofiatun Nur Putri dan seorang adik bernama Muhammad Shiddiq As Sholeh. Penulis berkewarganegaraan Indonesia, bersuku Jawa, dan beragama Islam.

Riwayat pendidikan dimulai dari TK Al Khairiyah, kemudian SD Negeri 2 Kampung Baru, SMP Negeri 20 Bandar Lampung, dan MAN 2 Bandar Lampung. Pada tahun 2022, penulis diterima sebagai mahasiswa S1 Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN.

Selama perkuliahan, penulis aktif dalam organisasi dan pengembangan diri. Penulis tergabung dalam LPM Republica sejak awal kuliah, menjabat sebagai Manager Keuangan pada tahun 2023 dan Pemimpin Usaha pada tahun 2024. Selain itu, penulis juga aktif di KOPMA UNILA serta memiliki pengalaman internship usaha yang memberikan pemahaman praktis terkait pengelolaan usaha dan pelayanan.

Di bidang pengabdian, penulis aktif sebagai Relawan Pengajar Sosiologi di komunitas Janji Baik pada Tahun Pelajaran 2024/2025. Penulis juga mengikuti Program MBKM selama satu semester di Direktorat Bela Negara, Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan, Kementerian Pertahanan RI. Seluruh pengalaman tersebut memberikan wawasan mengenai isu bela negara, dinamika masyarakat, serta pemberdayaan, sekaligus mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kepekaan sosial.

MOTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”

(Q.S Al-Insyirah:5)

“You can't control what happens to you, but you can control how you respond.”

(Mark Manson)

“You do not rise to the level of your goals. You fall to the level of your systems.”

(James Clear)

“You now, you should try see how far you can go, see what you can do in this life, because the world is full of possibilities, and there's so many cool places you can go and see. You just need your hands, a dream in your heart, some courage maybe, and you go love.”

(Anonymous)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahillāhirabbil ‘ālamīn, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dengan penuh rasa syukur, karya sederhana ini penulis persembahkan sebagai bentuk terima kasih atas segala kemudahan, kekuatan, dan pertolongan yang telah diberikan.

Dengan penuh rasa syukur dan kasih sayang, karya ini penulis persembahkan kepada:

Kedua Orang Tuaku

Kedua orang tua tercinta, Bapak Almarhum Ahmad Syaifullah dan Ibu Yusniati, yang senantiasa menjadi sumber doa, kasih sayang, serta kekuatan bagi penulis dalam setiap langkah kehidupan. Teruntuk Bapak, walaupun raga sudah tidak bersama, penulis selalu mengingat setiap pesan dan keyakinan yang Bapak titipkan—bahwa penulis pasti bisa. Teruntuk Ibu, yang selalu mengusahakan setiap keinginan penulis demi terwujudnya cita-cita, serta tidak pernah lelah memberikan doa, dukungan, dan kasih sayang yang tulus. Terima kasih atas segala pengorbanan, cinta, dan doa yang tiada henti diberikan kepada penulis.

Kakak dan Adik

Mba Khofiatun Nur Putri dan Adik Muhammad Shidiq terima kasih atas doa, dukungan, serta kebersamaan yang selalu memberikan semangat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Para Pendidik dan Bapak Ibu Dosen

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pendidik dan Bapak Ibu Dosen yang dengan penuh dedikasi telah membimbing, mengarahkan, dan menanamkan ilmu pengetahuan.

Almamater Tercinta, Universitas Lampung

SANWACANA

Dengan mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia, dan kemudahan-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tiga Organisasi Masyarakat Mitra Kemhan dan Kesadaran Bela Negara: Antara Harapan, Tantangan, dan Temuan Lapangan Sosiologi Pertahanan”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosiologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada:

1. Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmat kesehatan, kekuatan, kemudahan dan pertolongan dalam setiap langkah penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN Eng., selaku Rektor Universitas Lampung.
3. Prof. Dr. Anna Gestiana Zainal, S.Sos, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
4. Ibu Dr. Bartoven Vivit Nurdin, M.Si. selaku Ketua Jurusan Sosiologi sekaligus dosen pembimbing. Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan, arahan, kesabaran, serta ilmu yang sangat berharga yang telah diberikan kepada penulis. Terima kasih atas segala waktu, perhatian, dan dukungan yang telah diberikan sehingga mampu melancarkan setiap proses penyusunan skripsi ini hingga dapat diselesaikan dengan baik. Semoga Ibu senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, dan kebaikan dalam setiap langkah kehidupan.

5. Bapak Azis Amriwan S.Sos, M.Si. Selaku dosen penguji. Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu, masukan, kritik, dan saran yang sangat membangun sehingga skripsi ini dapat menjadi lebih baik. Semoga Bapak senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan dalam setiap langkah kehidupan.
6. Ibu Dr. Erna Rohana M.Si. selaku dosen Pembimbing Akademik di Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
7. Seluruh Dosen Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, atas bimbingan dan juga ilmu yang bermanfaat sebagai bekal bagi penulis.
8. Staf Jurusan Sosiologi, Pak Daman dan Pak Edi, penulis mengucapkan terima kasih banyak karena telah memberikan bantuan dan pelayanan yang sangat baik dalam memenuhi berbagai keperluan administrasi penulis.
9. Kedua orang tuaku tercinta, Almarhum Bapak Ahmad Syaifullah dan Ibu Yusniati, yang senantiasa memberikan dukungan penuh dalam setiap langkahku, mempercayaku, serta berusaha memfasilitasi yang terbaik demi masa depanku. Terima kasih atas doa yang tidak pernah putus, kasih sayang yang tulus, nasihat yang menenangkan, serta pengorbanan yang begitu besar, baik moril maupun materil, sehingga penulis dapat terus melangkah, bertahan, dan sampai pada titik ini. Terima kasih karena selalu menjadi sumber kekuatan, semangat, dan tempat pulang dalam setiap proses yang dilalui.
10. Untuk kakak dan adikku, Mbak Khofiatun Nur Putri dan adik Muhammad Shidiq As Sholeh, terima kasih atas doa, dukungan, dan semangat yang selalu diberikan. Terima kasih karena selalu menjadi tempat berbagi cerita, memberi motivasi di saat penulis merasa lelah, serta menghadirkan keceriaan yang membuat proses ini terasa lebih ringan. Kehadiran kalian menjadi penguat bagi penulis untuk terus berusaha dan tidak menyerah dalam menyelesaikan karya ini.
11. Untuk sahabat penulis sejak SMP hingga sekarang, Lili Levia, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan semangat yang selalu diberikan. Terima kasih telah hadir dalam setiap proses, menjadi tempat berbagi cerita, serta

memberikan kenyamanan layaknya saudara sendiri, sehingga penulis dapat menjalani semuanya dengan lebih kuat dan penuh semangat.

12. Untuk Wahyu Suhendri, terima kasih karena telah selalu menemani proses penulis, menjadi pendengar setia dalam setiap cerita, baik suka maupun duka, serta senantiasa memberikan dukungan, motivasi, dan semangat kepada penulis dalam menjalani proses perkuliahan dan meraih cita-cita.
13. Untuk sahabat penulis sejak MAN 2, Rahmatul Hidayah, Indi Maulida, dan Indah Septia Lestari, terima kasih atas kebersamaan, keceriaan, serta dukungan yang selalu diberikan. Terima kasih telah menjadi teman berbagi cerita, berdiskusi, dan saling mendukung dalam perkuliahan maupun meraih cita-cita, sehingga memberi semangat dan motivasi bagi penulis.
14. Untuk sahabat di Rongot Team (berdasarkan urutan abjad), Agustin Anggraisa, Ajeng Wahyu Restiani, Az Zahra Kartika Maharani, Emi Geloriani, Erika Nurlidiya, Oryza Sativa, dan Resti Amanda, terima kasih telah menemani masa-masa perkuliahan penulis dengan penuh kenangan indah sejak semester 1 hingga akhir. Terima kasih atas kebersamaan yang selalu terasa hangat, mulai dari selalu berbagi tempat duduk, bekerja sama dalam tugas dan kerja kelompok, hingga saling menemani dalam berbagai cerita suka dan duka. Kehadiran kalian memberikan banyak tawa, dukungan, serta kenangan berharga yang tidak terlupakan selama perjalanan perkuliahan ini.
15. Untuk sahabat penulis di KKN Desa Trimulyo Mataram, Gusmalinda Nur Azizah, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan bantuan yang diberikan, khususnya dalam proses penulisan skripsi. Terima kasih telah menjadi teman berbagi cerita, memberikan motivasi, serta menghadirkan semangat dalam setiap proses yang dilalui.
16. Untuk teman-teman penulis di Subdirektorat Lingkup Masyarakat, Risma Oktavia dan Wanda Aulia, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan berbagai cerita yang dibagikan selama di Jakarta. Terima kasih telah menjadi teman yang baik, saling berbagi pengalaman, serta selalu menguatkan dalam setiap proses yang dijalani. Kehadiran kalian memberikan kenyamanan, semangat, dan motivasi bagi penulis.

17. Untuk teman-teman magang Kementerian Pertahanan, Alya, Putri, Niken, Zahira, Galih, dan Rehan, terima kasih atas kebersamaan dan dukungan selama menjalani masa magang. Kebersamaan tersebut memberikan pengalaman dan motivasi bagi penulis dalam menjalani proses ini.
18. Untuk Novi Herlianti dan Nur Ofiqoh terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan perhatian yang telah diberikan selama ini. Hal tersebut sangat membantu dan memberi semangat bagi penulis dalam menjalani setiap proses.
19. Untuk teman-teman di LPM Republica, Aura, Cicha, Anita, dan Susilo, serta teman-teman lainnya, terima kasih atas kebersamaan, pembelajaran, dan pengalaman yang telah dilalui bersama. Seluruh proses dan dinamika yang ada turut memberikan banyak pelajaran serta berperan dalam membentuk kedewasaan, tanggung jawab, dan cara berpikir penulis.
20. Untuk teman-teman Sosiologi Angkatan 2022 yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan bantuan yang pernah diberikan selama proses perkuliahan. Meskipun seiring waktu masing-masing memiliki kesibukan dan jalan yang berbeda, kenangan serta kebaikan yang pernah dibagikan tetap menjadi bagian berharga dalam perjalanan penulis menyelesaikan perkuliahan ini.
21. Terakhir, untuk diriku sendiri, terima kasih karena sudah mampu bertahan dan berjuang sampai pada titik ini. Berbagai pengalaman, baik sedih maupun senang, telah dilalui selama masa perkuliahan, dengan segala proses jatuh bangun yang tidak selalu mudah, namun tetap berusaha untuk bangkit kembali. Terima kasih karena telah terus mencoba melakukan yang terbaik, bahkan ketika tidak selalu mendapatkan umpan balik yang diharapkan. Terima kasih karena berani melawan rasa takut, cemas, gelisah, dan overthinking, serta tetap melangkah dengan penuh harapan. Semua proses yang telah dilewati menjadi bukti bahwa penulis mampu bertahan, belajar, dan terus berkembang menjadi pribadi yang lebih kuat.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa karya ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Semoga karya ini

dapat memberikan manfaat dan menjadi langkah awal untuk terus berkembang di masa mendatang.

Bandar Lampung, 8 April 2026

Tsania Kholiza Nur Putri
NPM 2216011080

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
II. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Tinjauan Tentang Organisasi Masyarakat.....	9
2.2 Tinjauan Tentang Bela Negara.....	11
2.3 Tinjauan Tentang Kemitraan Negara dan Masyarakat Sipil	15
2.4 Perspektif Sosiologi Pertahanan.....	18
2.5 Landasan Teori.....	20
2.6 Kajian Penelitian Terdahulu.....	22
2.7 Kerangka Berpikir Penelitian.....	27
III. METODE PENELITIAN	29
3.1 Jenis Penelitian.....	29
3.2 Lokasi Penelitian.....	30
3.3 Fokus Penelitian	30
3.4 Informan Penelitian.....	31
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	33
3.6 Teknik Analisis Data.....	37
IV. GAMBARAN UMUM PENELITIAN	42
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	42

4.2 Profil Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI)...	43
4.2.1 Kelembagaan Kemhan RI	43
4.2.2 Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan (Ditjen Potan).....	46
4.2.3 Direktorat Bela Negara	48
4.2.4 Program Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN)	49
4.3 Profil Organisasi Masyarakat Mitra Kemhan RI	52
4.3.1 Forum Kader Bela Negara	52
4.3.2 Pemuda Pemudi Bela Negara (PPBN)	55
4.3.3 Generasi Muda Bela Negara (GMBN).....	58
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	61
5.1 Profil Informan.....	62
5.2 Hasil Penelitian	65
5.2.1 Peran Organisasi Masyarakat sebagai Mitra Kementerian Pertahanan dalam PKBN.....	65
5.2.1.1 Pelaksana Sosialisasi dalam Kegiatan PKBN	65
5.2.1.2 Penguat Kemitraan Strategis dengan Kemhan	73
5.2.1.3 Penguat Disiplin dan Komitmen Kader Bela Negara..	83
5.2.2 Harapan Organisasi Masyarakat dalam PKBN.....	89
5.2.2.1 Pembinaan dari Kementerian Pertahanan.....	89
5.2.2.2 Dukungan Pendanaan dan Fasilitas Program	95
5.2.2.3 Penguatan SDM dan Pelatihan	101
5.2.2.4 Penerimaan Nilai Bela Negara di Masyarakat.....	108
5.2.2.5 Keterlibatan dan Keberlanjutan Partisipasi	113
5.2.3 Tantangan Organisasi Masyarakat dalam PKBN.....	118
5.2.3.1 Kesalahpahaman Makna Bela Negara dan Disinformasi	118
5.2.3.2 Rendahnya Minat Generasi Muda dalam Bela Negara	124
5.2.3.3 Pengaruh Globalisasi terhadap Nilai Nasionalisme....	127
5.2.4 Kelemahan Internal Organisasi dalam PKBN.....	130
5.2.4.1 Keterbatasan Anggaran, SDM, dan Koordinasi	130
5.2.4 Pemaknaan Nilai Bela Negara oleh Organisasi Masyarakat dalam PKBN	135
5.2.4.1 Nilai Tanggung Jawab dan Kepedulian Sosial	135
5.2.5.2 Disiplin dan Pembiasaan Perilaku Bela Negara	141
5.2.4.3 Kaderisasi dan Keberlanjutan	147
5.3 Pembahasan.....	153
5.3.1 Organisasi Masyarakat sebagai Penyebar dan Penggerak Program Bela Negara (Eksternalisasi)	153
5.3.2 Realitas Pelaksanaan Program Bela Negara: Harapan dan Tantangan Organisasi (Objektivasi).....	157
5.3.3 Pemaknaan dan Penghayatan Bela Negara oleh Organisasi (Internalisasi).....	161
5.3.4 Temuan Penelitian dalam Perspektif Sosiologi Pertahanan.....	165

VI PENUTUP	168
6.1 Kesimpulan	168
6.2 Saran.....	170
DAFTAR PUSTAKA	171
LAMPIRAN.....	176

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Penelitian Terdahulu	23
2. Profil Informan Penelitian.....	32
3. Pedoman Observasi.....	35
4. Studi Dokumentasi.....	36
5. Peran Strategis Ormas dalam Kemitraan dengan Kemhan	81
6. Matriks Eksternalisasi Organisasi dalam PKBN	154
7. Matriks Objektivasi Organisasi Dalam PKBN	158
8. Matriks Internalisasi Nilai Bela Negara dalam Organisasi.....	161

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Konsep Nilai Dasar Bela Negara	12
2. Kerangka Berpikir Penelitian.....	28
3. Model Analisis Data Interaktif Miles dan Huberman.....	40
4. Dokumentasi dengan Informan ES, Sekretaris Utama FKBN,.....	222
5. Dokumentasi dengan Pengurus FKBN, pada 29 Oktober 2025	222
6. Dokumentasi kantor FKBN di Gedung Nyi Ageng Serang	223
7. Dokuemtasi ruang rapat FKBN di Gedung Nyi Agung Serang Lantai 5.	223
8. Dokumentasi dengan Informan SN, Ketua Bidang Ketahanan Pangan PPBN, pada 31 Oktober 2025	223
9. Dokumentasi dengan informan AR, Ketua Umum PPBN, pada 31 Oktober 2025	224
10. Dokumentasi dengan Anggota dewan pengawan PPBN	224
11. Dokumentasi dengan pengurus PPBN, pada 31 Oktober 2025	224
12. Dokumentasi Wawancara dengan pengurus GMBN, pada 30 Oktober 2025	225
13. Dokuemtasi dengan Pengurus GMBN di Kantor Sekretariat GMBN, pada 30 Oktober 2025	225
14. Dokumentaasi dengan Pengurus PPBN di Kemetrian Pertahanan	226

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesadaran bela negara di Indonesia pada masa kini tidak lagi dapat dipahami semata-mata dalam kerangka militeristik. Konsep bela negara telah berkembang menjadi fenomena sosial yang berkaitan dengan identitas kebangsaan, kohesi sosial, serta kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi berbagai ancaman di era kontemporer. Dalam perspektif sosiologi, sebagaimana dijelaskan oleh Soerjono Soekanto, fenomena sosial muncul ketika terjadi ketidaksesuaian antara nilai yang diharapkan dengan praktik yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat. Ketidaksesuaian tersebut dapat memunculkan berbagai persoalan sosial yang memerlukan perhatian dan penanganan bersama (Soekanto, 2010). Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, persoalan tersebut berkaitan erat dengan ketahanan nasional. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis suatu bangsa yang mencerminkan keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Dengan demikian, kekuatan suatu negara tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militer, tetapi juga oleh kesiapan dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan kehidupan nasional (Lemhannas, 2020).

Pada dasarnya, pembelaan negara merupakan wujud konkret kontribusi warga negara dalam memperkuat ketahanan nasional tersebut. Namun dalam praktiknya, pemahaman mengenai bela negara masih sering dipersempit seolah-olah hanya berkaitan dengan aktivitas militer atau tugas Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pandangan ini menimbulkan kesan bahwa tanggung jawab membela negara merupakan tugas aparat semata, bukan tanggung jawab kolektif seluruh warga negara. Padahal, bela negara mencakup tekad, sikap, dan

tindakan warga negara yang dilandasi oleh rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta kesediaan untuk berkontribusi dalam menjaga kedaulatan dan keselamatan negara (Kandek & Widodo, 2023).

Secara konstitusional, kewajiban tersebut telah ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Hal ini menunjukkan bahwa pertahanan negara bukanlah domain eksklusif institusi militer, melainkan tanggung jawab kolektif seluruh rakyat Indonesia.

Meskipun demikian, dalam kehidupan sosial kontemporer pemaknaan bela negara masih sering terbatas pada aspek simbolik dan seremonial. Penyempitan makna ini berdampak pada rendahnya keterlibatan masyarakat dalam upaya pertahanan non-militer, padahal ancaman terhadap negara pada era globalisasi bersifat multidimensional. Ancaman tersebut tidak hanya hadir dalam bentuk agresi militer, tetapi juga melalui disinformasi digital, radikalisme, polarisasi sosial, degradasi moral, hingga bencana alam yang memerlukan kesiapsiagaan masyarakat secara kolektif (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2015).

Berbagai fenomena sosial menunjukkan bahwa kesadaran kebangsaan masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda, masih menghadapi berbagai tantangan di era digital. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Hartono menunjukkan bahwa semangat nasionalisme, patriotisme, dan bela negara di kalangan generasi muda cenderung mengalami penurunan. Hal ini terlihat dari berbagai indikasi sosial seperti meningkatnya sikap intoleransi, munculnya fanatisme kelompok, serta berkurangnya kepedulian terhadap simbol-simbol negara seperti bendera dan lagu kebangsaan. Selain itu, apresiasi terhadap kebudayaan nasional juga dinilai semakin menurun di tengah pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi informasi (Hartono, 2022).

Di sisi lain, tantangan terhadap kesadaran bela negara juga terlihat dari berbagai persoalan sosial yang muncul di kalangan generasi muda. Penelitian tersebut

menunjukkan bahwa sejumlah siswa di lingkungan pendidikan masih menghadapi berbagai permasalahan seperti kekerasan di sekolah, perundungan (bullying), serta kecenderungan sikap radikal di kalangan pelajar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa internalisasi nilai-nilai kebangsaan di kalangan generasi muda masih belum sepenuhnya optimal. Selain itu, perkembangan teknologi digital juga mempercepat penyebaran informasi yang tidak selalu sejalan dengan nilai kebangsaan, seperti maraknya penyebaran hoaks dan konten intoleransi di media sosial yang dapat memengaruhi cara pandang generasi muda terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara (Hartono, 2022).

Fenomena lain yang cukup mencolok adalah munculnya tren #KaburAjaDulu yang sempat viral di media sosial. Fenomena ini merefleksikan kecenderungan *brain drain*, yaitu migrasi tenaga muda terampil ke luar negeri karena berbagai faktor seperti terbatasnya lapangan pekerjaan, rendahnya tingkat upah, serta persepsi terhadap sistem kerja yang kurang meritokratis. Jika dikaitkan dengan kesadaran bela negara, kecenderungan tersebut menunjukkan adanya pergeseran orientasi dari komitmen kolektif terhadap pembangunan nasional menuju pilihan individual yang lebih pragmatis.

Fenomena lain yang juga mengundang perhatian adalah peristiwa ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta pada November 2025. Kajian akademik menyebutkan bahwa peristiwa tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tekanan psikososial, lemahnya kemampuan regulasi emosi pada remaja, serta paparan konten digital bermuatan kekerasan yang mudah diakses melalui media sosial dan internet (Audina et al., 2026). Peristiwa ini tidak hanya dipandang sebagai tindak kriminal semata, tetapi juga mencerminkan adanya persoalan yang lebih luas terkait penguatan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial sebagaimana tercantum dalam Pancasila.

Berbagai fenomena tersebut menunjukkan bahwa persoalan kesadaran bela negara pada era kontemporer tidak dapat dipahami secara sederhana. Ia merupakan persoalan sosial yang bersifat multidimensional dan berkaitan dengan perubahan nilai dalam masyarakat. Oleh karena itu, penguatan

kesadaran bela negara menjadi semakin penting dalam menjaga ketahanan nasional.

Dalam konteks tersebut, pemerintah melalui Kementerian Pertahanan menginisiasi Program Kesadaran Bela Negara (PKBN) sebagai salah satu strategi untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan kepada masyarakat. Program ini dirancang untuk menumbuhkan kesadaran warga negara mengenai pentingnya cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi berbagai ancaman terhadap negara (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2019).

Secara kelembagaan, pelaksanaan Program Kesadaran Bela Negara dilaksanakan melalui tiga lingkup utama, yaitu lingkungan pendidikan, lingkungan pekerjaan, dan lingkungan masyarakat. Lingkup masyarakat menjadi menarik untuk dikaji karena di dalamnya terjadi interaksi langsung antara negara dan masyarakat melalui berbagai organisasi kemasyarakatan yang berperan sebagai mitra pemerintah dalam menyosialisasikan nilai-nilai bela negara.

Dalam perspektif teori konstruksi sosial yang dikemukakan oleh Berger dan Luckmann, realitas sosial termasuk nilai-nilai kebangsaan tidak terbentuk secara otomatis, melainkan melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi dalam kehidupan sosial. Dalam konteks ini, nilai bela negara dapat dipahami sebagai hasil konstruksi sosial yang terbentuk melalui interaksi antara negara, organisasi masyarakat, dan individu dalam kehidupan sosial.

Penelitian ini memfokuskan kajian pada tiga organisasi masyarakat mitra Kementerian Pertahanan, yaitu Forum Kader Bela Negara (FKBN), Pemuda Pemudi Bela Negara (PPBN), dan Generasi Muda Bela Negara (GMBN). Ketiga organisasi ini dipilih untuk menggambarkan variasi keterlibatan masyarakat sipil dalam mendukung pertahanan negara di ranah non-militer.

Forum Kader Bela Negara (FKBN) merupakan wadah bagi para Kader Bela Negara yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan bela negara yang

diselenggarakan oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. FKBN dibentuk atas inisiatif para kader dan difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Pertahanan Provinsi DKI Jakarta sebagai wadah untuk menghimpun serta mengkoordinasikan para kader bela negara dari berbagai latar belakang profesi dan wilayah.

Pemuda Pemudi Bela Negara (PPBN) merupakan organisasi yang berfokus pada pembinaan dan pengembangan generasi muda yang memiliki karakter bela negara. Organisasi ini bertujuan mendukung program bela negara yang diselenggarakan oleh pemerintah serta membentuk kader muda yang memiliki jiwa, semangat, dan nilai-nilai kebangsaan.

Sementara itu, Generasi Muda Bela Negara Republik Indonesia (GMBN) merupakan organisasi kemasyarakatan yang mewadahi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk berperan aktif dalam upaya bela negara. Organisasi ini bertujuan menghimpun dan membina potensi masyarakat serta menumbuhkan kesadaran bela negara melalui kegiatan pendidikan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketiga organisasi masyarakat tersebut dipilih sebagai subjek penelitian berdasarkan sejumlah pertimbangan, antara lain keterlibatan langsung dalam program bela negara, cakupan wilayah kerja yang berbeda, serta ketersediaan data dan akses lapangan yang memungkinkan penelitian dilakukan secara mendalam.

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa organisasi masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung penguatan ketahanan nasional serta menghadapi berbagai ancaman non-militer. Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada strategi pemberdayaan masyarakat atau optimalisasi peran organisasi sebagai mitra pemerintah dalam pelaksanaan program bela negara.

Kajian yang secara khusus menelaah bagaimana organisasi masyarakat memaknai, mengonstruksi, dan menjalankan nilai kesadaran bela negara dalam praktik organisasi sehari-hari masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna memahami secara lebih komprehensif dinamika hubungan antara negara dan masyarakat sipil dalam ranah pertahanan non-militer.

Melalui kajian terhadap tiga organisasi masyarakat mitra Kementerian Pertahanan yang memiliki pendekatan dan karakteristik berbeda, penelitian ini menggambarkan bagaimana konstruksi kesadaran bela negara terbentuk dan dijalankan dalam praktik komunitas. Penelitian ini juga memberikan gambaran mengenai dinamika peran organisasi masyarakat dalam mendukung penguatan nilai-nilai kebangsaan serta menjadi bahan pertimbangan bagi upaya penguatan sinergi antara pemerintah dan organisasi masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan sosial yang semakin kompleks dan dinamis.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan di atas maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana organisasi masyarakat FKBN, PPBN, dan GMBN menjalankan peran sebagai mitra Kementerian Pertahanan dalam pelaksanaan Program Kesadaran Bela Negara (PKBN)?
2. Apa saja harapan yang dibangun serta tantangan sosial dan kelembagaan yang dihadapi FKBN, PPBN, dan GMBN dalam menanamkan nilai bela negara di masyarakat?
3. Bagaimana FKBN, PPBN, dan GMBN memaknai nilai bela negara dalam praktik organisasi masing-masing?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini berdasarkan pemaparan latar belakang dan rumusan masalah diatas, yaitu:

1. Menganalisis bagaimana FKBN, PPBN, dan GMBN menjalankan peran sebagai mitra Kementerian Pertahanan dalam pelaksanaan Program Kesadaran Bela Negara (PKBN).
2. Mengidentifikasi dan menganalisis harapan yang dibangun serta tantangan sosial dan kelembagaan yang dihadapi FKBN, PPBN, dan GMBN dalam menanamkan nilai bela negara di masyarakat.
3. Menganalisis bagaimana FKBN, PPBN, dan GMBN memaknai nilai Bela Negara dalam praktik organisasi masing-masing.

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian sosiologi, khususnya dalam bidang sosiologi pertahanan dan kajian organisasi masyarakat, dengan menghadirkan temuan empiris mengenai bagaimana nilai Bela Negara dibentuk, dipraktikkan, dan dimaknai dalam kehidupan organisasi. Temuan ini menunjukkan bahwa nilai kebangsaan tidak berdiri sebagai konsep normatif semata, tetapi berkembang melalui proses sosial di dalam praktik organisasi.
- b) Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkuat penerapan teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann dalam kajian nilai kebangsaan, dengan menunjukkan secara empiris proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi nilai Bela Negara dalam praktik organisasi masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi rujukan konseptual bagi pengembangan studi sosiologis tentang

konstruksi nilai dan kesadaran kebangsaan dalam konteks pertahanan non-militer.

2. Manfaat Praktis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Direktorat Bela Negara di lingkungan Kementerian Pertahanan RI dalam memperkuat pola kemitraan dengan organisasi masyarakat. Temuan lapangan dalam penelitian ini dapat membantu memahami bagaimana nilai Bela Negara dipraktikkan dan dimaknai di tingkat organisasi, sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam menyusun pendekatan program, metode pembinaan, dan strategi komunikasi yang lebih kontekstual dengan dinamika sosial organisasi mitra.
- b) Bagi organisasi masyarakat mitra, penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan refleksi untuk melihat kembali praktik penanaman nilai Bela Negara yang telah dijalankan, termasuk kekuatan, hambatan, dan tantangan yang dihadapi. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi dalam mengembangkan model pembinaan, strategi penyampaian nilai, serta penguatan kaderisasi agar peran organisasi dalam menumbuhkan kesadaran kebangsaan dapat berjalan lebih terarah dan berkelanjutan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tentang Organisasi Masyarakat

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Masyarakat merupakan entitas sosial yang dibentuk secara sukarela oleh anggota masyarakat berdasarkan kesamaan aspirasi, kebutuhan, kegiatan, dan tujuan tertentu. Secara yuridis, undang-undang tersebut juga menegaskan bahwa Organisasi Masyarakat didirikan atas dasar kesamaan aspirasi, kehendak, dan kepentingan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional yang berlandaskan Pancasila. Dalam konteks sosiologis, keberadaan Organisasi Masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai wadah berkumpulnya individu dengan kesamaan minat, tetapi juga sebagai agen sosial yang berperan dalam pembentukan norma, penyebaran nilai, dan penguatan kohesi sosial di masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 Undang-Undang tersebut, Organisasi Masyarakat bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat;
- b. Memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- c. Menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- d. Melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat;
- e. Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- f. Mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat;
- g. Menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan
- h. Mewujudkan tujuan negara.

Tujuan-tujuan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan Organisasi Masyarakat tidak hanya sebagai wadah aktivitas sosial, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah dalam membangun masyarakat yang berdaya, inklusif, dan berorientasi pada nilai-nilai kebangsaan.

Dalam konteks ini, posisi Organisasi Masyarakat dapat dikatakan sebagai jembatan antara kepentingan masyarakat dengan kepentingan negara atau pemerintah, khususnya dalam hal menyuarakan berbagai persoalan yang ingin diaspirasikan kepada pengambil kebijakan (Nugroho, 2023).

Organisasi Masyarakat juga merupakan bagian dari masyarakat sipil. Organisasi masyarakat sipil merupakan elemen penting dalam sebuah negara demokrasi. Kontribusinya dinilai berperan penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Mereka merupakan mitra pemerintah dalam implementasi program-program pembangunan; di samping fungsinya sebagai penyambung lidah rakyat serta penyeimbang relasi antara rakyat dan negara (Herdiansyah & Randi, 2016)

Keberadaan Organisasi Masyarakat diperlukan untuk menciptakan penegakan hukum yang efektif, serta melindungi masyarakat dari potensi kesewenang-wenangan pemerintah. Kelompok-kelompok ini, apabila dikelola secara kuat dan mandiri, mampu melakukan fungsi pengawasan terhadap kekuasaan, sehingga dapat menghadirkan keadaan pluralisme yang seimbang di antara beragam kepentingan masyarakat. Dengan demikian, tidak ada satu pun kelompok yang memiliki peluang untuk mendominasi secara mutlak (Halili, 2006).

Organisasi pada hakikatnya dapat dipahami sebagai kelompok sosial yang terstruktur secara rasional untuk mencapai tujuan kolektif. Organisasi masyarakat pun mencerminkan dinamika sosial yang lebih luas, di mana nilai dan norma terbentuk melalui interaksi berkelanjutan antar individu. Dengan demikian, organisasi bisa dipandang sebagai miniatur struktur sosial yang menampilkan relasi kekuasaan serta pola perilaku anggotanya (Rahman et al., 2023)

Secara keseluruhan, organisasi masyarakat merupakan sistem sosial yang kompleks dan tidak terpisahkan dari struktur masyarakat (Nurdin,2021). Kajian sosiologis terhadapnya tidak hanya memberikan pemahaman akademis tentang bagaimana kelembagaan sosial dibangun, tetapi juga memiliki relevansi praktis yang tinggi untuk merancang kebijakan sosial yang inklusif dan efektif dalam menyelesaikan persoalan kemasyarakatan.

2.2 Tinjauan Tentang Bela Negara

Secara hukum, konsep Bela Negara telah didefinisikan secara komprehensif oleh Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 8 Tahun 2022 Pasal 1. Peraturan tersebut menyatakan bahwa Bela Negara bukan hanya berupa tindakan fisik, melainkan sebuah konstruksi yang dimulai dari tekad, sikap, dan perilaku warga negara, baik secara individu maupun kolektif. Tujuannya adalah untuk menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa yang dijiwai oleh kecintaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan nilai-nilai bela negara dan ketaatan hukum Warga Negara Indonesia (WNI). Artinya, bela negara tidak hanya dilakukan oleh kalangan militer, melainkan wajib diwujudkan oleh seluruh Warga Negara Indonesia (WNI). Selain itu, bela negara juga bukan soal kekuatan senjata semata, tetapi dapat diimplementasikan sesuai dengan bidang yang ada.

Kesadarannya Bela Negara dilandasi rasa cinta tanah air. Rasa cinta adalah kondisi jiwa manusia yang mendorong terfokusnya seluruh daya upaya untuk dapat memperoleh apa yang diinginkannya. Demikian juga rasa cinta tanah air akan mengarahkan warga negara pada dorongan untuk mempersembahkan yang terbaik bagi negara dan bangsa. Rasa cinta tanah air adalah patriotisme, warga negara yang memiliki rasa cinta tanah air adalah patriot, sedangkan perilaku yang timbul karenanya adalah perilaku propatria, demi negara. Karena sifatnya itu cinta tanah air, Bela Negara menjadi sesuatu yang agung. Keagungannya menjadikan setiap warga negara ingin meraih dan berpartisipasi. (Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan, 2024, hlm. 3)

Dalam konteks konstitusi, kesadaran bela negara telah diamanatkan secara eksplisit dalam Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Lebih lanjut, Pasal 30 ayat (1) UUD 1945 juga menegaskan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.” Ketentuan ini diperjelas melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, khususnya dalam Pasal 9, yang menyatakan bahwa bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dilandasi oleh kecintaan kepada tanah air dan semangat nasionalisme.

Namun, sikap dan perilaku bela negara tidak serta-merta muncul secara alami dalam diri setiap individu sejak lahir. Oleh karena itu, kesadaran tersebut perlu ditumbuhkembangkan sejak dini dan senantiasa dipelihara melalui pembinaan secara berkelanjutan.



Gambar 1. Konsep Nilai Dasar Bela Negara
Sumber: diolah penulis berdasarkan Ditjen Pothan, 2024.

Dalam nilai Bela Negara terkandung nilai dasar sebagai berikut:

- a) Cinta tanah air, yakni terhadap komitmen negara dan memahami wilayah serta tujuan nasional sehingga selalu rela serta siap membela tanah air

Indonesia mencapai tujuan nasionalnya dan dari segala bentuk ancaman baik militer maupun non militer.

- b) Sadar berbangsa dan bernegara Indonesia, yaitu kesadaran untuk selalu membina kerukunan, persatuan dan kesatuan serta selalu mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan serta memahami sejarah kenegaraan Indonesia dan menghormati lambang dan lagu kebangsaan serta mentaati seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c) Setia pada Pancasila sebagai Ideologi Negara, yaitu kesetiaan akan landasan kehidupan bangsa Pancasila yang dapat membawa kepada kehidupan sesuai yang dicita-citakan.
- d) Rela berkorban untuk bangsa dan negara, yaitu setiap langkah dan tindakan tidak semata-mata mementingkan diri sendiri, tetapi lebih untuk kemaslahatan umum.
- e) Memiliki kemampuan awal Bela Negara, yang karena keempat kualitas di atas mampu menampilkan sifat-sifat terampil, disiplin, ulet, tanggap, trengginas serta percaya pada kemampuan diri.

(Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan, 2024, hlm. 3)

Menurut Siregar, Waluyo, & Lindra (2024), Unsur-unsur nilai tersebut merupakan pedoman bagi setiap warga negara Indonesia dalam rangka mencapai tujuan bela negara, yang diantaranya adalah: (1) mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara; (2) melestarikan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945; serta (3) menjaga identitas dan integritas bangsa, *core business* dari bela negara pada hakekatnya adalah kesediaan berbakti dan berkorban demi bangsa dan negara"

Nilai-nilai dasar ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan Program Kesadaran Bela Negara (PKBN) yang digagas oleh Kementerian Pertahanan melalui pendekatan kemitraan, termasuk dengan organisasi masyarakat. Dalam hal ini, Organisasi masyarakat berperan sebagai agen sosial yang turut menanamkan nilai-nilai bela negara kepada anggotanya, sekaligus memperkuat ketahanan nasional berbasis masyarakat sipil.

Peran masyarakat sipil dalam konteks bela negara sangat krusial, khususnya sebagai komponen pendukung dan cadangan dalam sistem pertahanan negara. Kontribusi ini tidak hanya berupa partisipasi fisik, tetapi juga non-fisik, seperti meningkatkan kesadaran publik, menegakkan budaya anti korupsi, serta mendorong implementasi kebijakan pertahanan. Masyarakat sipil juga dapat dilibatkan dalam kondisi darurat sesuai profesi dan kapasitasnya, sekaligus mendukung pendidikan dan pelatihan kesadaran bela negara bagi seluruh warga negara sejak dini.

Di samping itu, masyarakat sipil memiliki fungsi strategis dalam pengawasan pemerintahan agar terbebas dari praktik korupsi dan pelanggaran hukum. Hal ini merupakan bagian integral dari upaya menjaga integritas nasional. Dalam menghadapi dinamika global dan ancaman non-tradisional seperti konflik sosial dan intoleransi, masyarakat juga dituntut lebih tanggap dan adaptif.

Dengan demikian, bela negara bukan hanya merupakan tanggung jawab militer ataupun pemerintah, melainkan kewajiban seluruh warga negara. Setiap individu memiliki potensi untuk berkontribusi dalam memperkuat ketahanan nasional sesuai dengan kapasitas dan bidang masing-masing.

Menurut modul WIRA Edisi Khusus Tahun 2017, kebijakan bela negara dalam konteks Kementerian Pertahanan (Kemhan) merupakan bagian dari strategi pertahanan nasional yang bertujuan membangun kekuatan pertahanan melalui partisipasi aktif seluruh komponen bangsa. Hal ini berlandaskan pada Pertahanan Semesta, yaitu sinergi antara kekuatan militer dan non-militer. Kemhan menegaskan bahwa bela negara tidak hanya menjadi tanggung jawab Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai komponen utama, tetapi juga seluruh rakyat sebagai komponen cadangan dan pendukung.

Kebijakan ini direalisasikan melalui program pembinaan kesadaran bela negara (PKBN) yang tercantum dalam berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 dan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 32 Tahun 2016. Program-program tersebut mencakup pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran, pengabdian sebagai prajurit TNI, dan pengabdian sesuai

dengan profesi masing-masing. Tujuannya adalah membentuk karakter bangsa yang mencintai tanah air, memiliki semangat kebangsaan, setia pada Pancasila, rela berkorban, dan memiliki kesiapan dasar dalam bela negara.

Melalui pendekatan komprehensif ini, Kemhan mendorong bela negara sebagai bagian dari revolusi mental dan pembangunan karakter bangsa, guna menciptakan daya tangkal yang kuat terhadap berbagai bentuk ancaman baik militer maupun non-militer dan memperkuat ketahanan nasional yang kokoh di tengah dinamika global dan domestik.

2.3 Tinjauan Tentang Kemitraan Negara dan Masyarakat Sipil

Kemitraan antara negara dan masyarakat sipil merupakan fondasi penting dalam tata kelola pemerintahan modern, khususnya dalam membangun demokrasi yang sehat, transparan, dan partisipatif.

Istilah kemitraan seringkali dipertukarkan dengan banyak istilah lain seperti kolaborasi, aliansi, ko-produksi atau konsorsium. Istilah ini sebenarnya sebagai perwujudan dari kerjasama antar individu atau kelompok yang saling membantu, saling menguntungkan dan secara bersama-sama meringankan pencapaian tujuan yang telah mereka sepakati bersama. Permasalahan definisi ini kemudian diikuti dengan pernyataan mendasar bahwa kemitraan sebagai proses, produk, hasil penjelajahan, atau hasil akhir (BorriniFeyerabend, 1996).

Menurut Fatmawati (2011), dalam kemitraan terjadi hubungan antarorganisasi dan dengan hubungan tersebut akan tercipta kerja sama. Sistem kemitraan bertumpu pada kepercayaan dengan ciri-ciri antara lain: (1) persamaan dan organisasi yang lebih landai; (2) hierarki aktualisasi yang luwes, di mana kekuasaan dipedomani oleh nilai-nilai seperti Caring dan Caretaking; (3) spiritualitas yang berbasis alamiah; (4) tingkat kekacauan yang rendah yang terbentuk dalam sistem; dan (5) persamaan dan keadilan gender.

Kemitraan antara masyarakat dan pemerintah merupakan elemen krusial dalam tata kelola pemerintahan yang demokratis dan partisipatif. Kemitraan ini

melibatkan peran aktif masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, sebagai “pemain sosial” yang memiliki kepentingan, keahlian, sumber daya, dan kapasitas pengambilan keputusan yang beragam (Fung, 2015). Dalam model governance kolaboratif, warga negara diposisikan bukan sebagai objek atau pelanggan semata, melainkan sebagai mitra sejajar yang berkontribusi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik (Ansell & Gash, 2008).

Pendekatan ini menekankan pentingnya dialog terbuka dan kerja sama antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk mewujudkan pelayanan publik yang responsif dan pembangunan berkelanjutan (Bovaird & Loeffler, 2012).

Secara operasional, gambaran masyarakat sipil yang dimaksud mencakup institusi-institusi non-pemerintah yang berada di masyarakat yang mewujudkan dirinya melalui organisasi, perkumpulan, atau pengelompokan sosial dan politik yang berusaha untuk membangun kemandirian seperti organisasi sosial dan keagamaan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), paguyuban, kelompok-kelompok kepentingan, dan sebagainya yang juga dapat menempuh jarak dan menunjukkan otonomi terhadap negara (Hadi, 2010).

Masyarakat sipil merupakan sebuah konsep yang sangat luas. (Hadi, 2010) mendefinisikan masyarakat sipil sebagai wilayah interaksi sosial yang di dalamnya mencakup semua kelompok sosial paling akrab (khususnya keluarga), asosiasi (terutama yang bersifat sukarela), gerakan kemasyarakatan, dan berbagai wadah komunikasi publik lainnya yang diciptakan melalui bentuk-bentuk pengaturan dan mobilisasi diri secara independen baik dalam hal kelembagaan maupun kegiatan.

Kebijakan berupa implementasi program penyelenggaraan pembinaan kesadaran bela negara oleh pemerintah saat ini dilaksanakan untuk masyarakat dari usia dini hingga usia dewasa dengan tujuan membangun karakter bangsa Indonesia yang cinta tanah air, rela berkorban untuk bangsa dan negara, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, memiliki kesadaran berbangsa dan

bernegara serta memiliki kemampuan awal bela negara. Pelaksanaan program ini dilakukan di lingkungan pendidikan, lingkungan pemukiman, dan lingkungan pekerjaan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diselenggarakan secara simultan, terpadu, menyeluruh, dan berkelanjutan, selaras dengan tujuan pembangunan nasional baik secara psikologis maupun fisik, masyarakat termasuk di kawasan perbatasan (Ditjenpothan Kementerian Pertahanan, 2014).

Upaya masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah perbatasan dalam membela negara harus didorong atas kesadaran dan rasa tanggung jawab untuk ikut bela negara dalam rangka mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga wajib untuk ikut serta dalam membela negara dari segala macam ancaman, gangguan, tantangan, dan hambatan baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Penyelenggaraan bela negara dalam upaya pertahanan negara didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri (Wahyudi, 2017)

Kebijakan pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertahanan melalui program promosi kesadaran bela negara yang dilaksanakan melalui Ditjen Pothan bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai bela negara. Sehingga setiap warga negara memiliki kesadaran dan mampu mengaktualisasikannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, tinggal, dan tergabung dalam organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi pemuda, partai politik, tokoh masyarakat, tokoh agama serta organisasi kemasyarakatan lainnya sesuai dengan peraturan-peraturan-undangan. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain: kegiatan pendidikan dan pelatihan masyarakat, kegiatan yang menunjang integrasi masyarakat, kegiatan solidaritas sosial, dan kegiatan penciptaan kondisi lingkungan yang kondusif (Kementerian Pertahanan RI, 2015).

Dalam konteks penelitian ini, peran Organisasi Masyarakat menjadi sangat penting. Sebagai sebuah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat dan memiliki agenda sosial yang jelas, bahkan telah diamanahi oleh Undang-undang dengan fungsi pemberdayaan, Organisasi Masyarakat sudah menjadi

sebuah keniscayaan untuk memperkuat pelaksanaan fungsi pemberdayaan kepada masyarakat. Keberadaan Organisasi Masyarakat dalam sebuah demokrasi negara juga dijadikan tolak ukur bagi proses demokrasi itu sendiri. Kuatnya nilai tawar Organisasi Masyarakat terhadap negara menunjukkan kuatnya masyarakat, yang berarti telah terjadi peningkatan pemberdayaan politik dan sosial dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, Organisasi Masyarakat harus memperkuat pengaruhnya di negara sehingga dapat menjadi cerminan masyarakat dalam setiap proses kebijakan pemerintah.

Organisasi Kemasyarakatan memiliki tujuan dan fungsi penting dalam bidang pemberdayaan. Sebagai agen pemerintahan, Organisasi Masyarakat memiliki peran yang cukup banyak. Keberadaan Organisasi Masyarakat di suatu negara juga menjadi bukti keberdayaan masyarakat. Organisasi Masyarakat yang kuat dan mampu mempengaruhi kebijakan pemerintah diyakini dapat menjadi agen pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahan, khususnya di bidang pemberdayaan (Mubarak, Ip, & Fis, 2014).

2.4 Perspektif Sosiologi Pertahanan

Pertahanan negara merupakan kekuatan sipil dan militer yang diselenggarakan oleh suatu negara untuk menjamin integritas wilayahnya, melindungi rakyat, dan menjaga kepentingan nasional. Definisi ini sejalan dengan pengertian dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yang menyatakan bahwa pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Pengembangan sistem pertahanan negara erat kaitannya dengan pemanfaatan sumber daya strategis pertahanan, yang meliputi anggaran pertahanan, infrastruktur militer, postur pertahanan, industri pertahanan, serta kemampuan logistik. Tujuan utamanya adalah menjaga dan melindungi kedaulatan negara,

keutuhan wilayah NKRI, serta keselamatan seluruh rakyat dari segala bentuk ancaman.

Hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan yang bersifat semesta, penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Pertahanan semesta ini melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya; dipersiapkan secara dini oleh pemerintah; serta diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berkelanjutan (Kementerian Pertahanan RI, 2015).

Sosiologi Pertahanan merupakan disiplin ilmu yang mempelajari interaksi dinamis antara institusi pertahanan (seperti militer dan kebijakan keamanan) dengan struktur sosial, nilai, dan dinamika masyarakat. Kajian ini mengeksplorasi bagaimana institusi pertahanan memengaruhi dan dipengaruhi oleh faktor sosial seperti budaya, kelas, etnis, agama, serta politik sipil. Dengan kata lain, sosiologi pertahanan melihat dari sudut pandang sosiologi bagaimana interaksi di masyarakat saling memengaruhi dan berdampak pada pertahanan suatu negara (Wahyudi, 2017).

Organisasi Masyarakat berdampak pada seluruh lapisan masyarakat, sehingga ketahanan nasional bergantung pada partisipasi sipil dan kepercayaan publik. Kedua, konflik bersenjata sering berakar pada masalah sosiologis seperti ketimpangan ekonomi atau diskriminasi etnis yang memerlukan solusi berbasis sosial. Ketiga, kebijakan pertahanan (misalnya sistem bela negara) hanya efektif jika selaras dengan nilai-nilai masyarakat (Ditjenpothan Kementerian Pertahanan, 2014).

Dalam konteks ini, Organisasi Kemasyarakatan memiliki peran strategis dalam sistem pertahanan semesta, baik melalui fungsi *early warning system* (mendeteksi dan melaporkan potensi ancaman seperti radikalisme, disinfOrganisasi Masyarakat, atau gejolak sosial sejak dini) maupun fungsi *first responder* (memberikan respon cepat seperti evakuasi, distribusi bantuan, dan pengamanan wilayah ketika ancaman atau bencana terjadi). Peran

ini memperkuat ketahanan sosial (*social resilience*), yang meliputi solidaritas komunitas dan kemampuan adaptasi masyarakat dalam menghadapi guncangan (Mubarak, Ip, & Fis, 2014).

Konsep “bela negara” dalam perspektif sosiologi pun diperluas: tidak hanya pertahanan fisik, tetapi juga partisipasi sipil melalui gotong royong, pelestarian lingkungan, toleransi, serta pencegahan radikalisme melalui pendidikan inklusif. Di masyarakat multikultural seperti Indonesia, bela negara harus menghindari pemaksaan identitas tunggal dan justru menumbuhkan harmoni (Wahyudi, 2017).

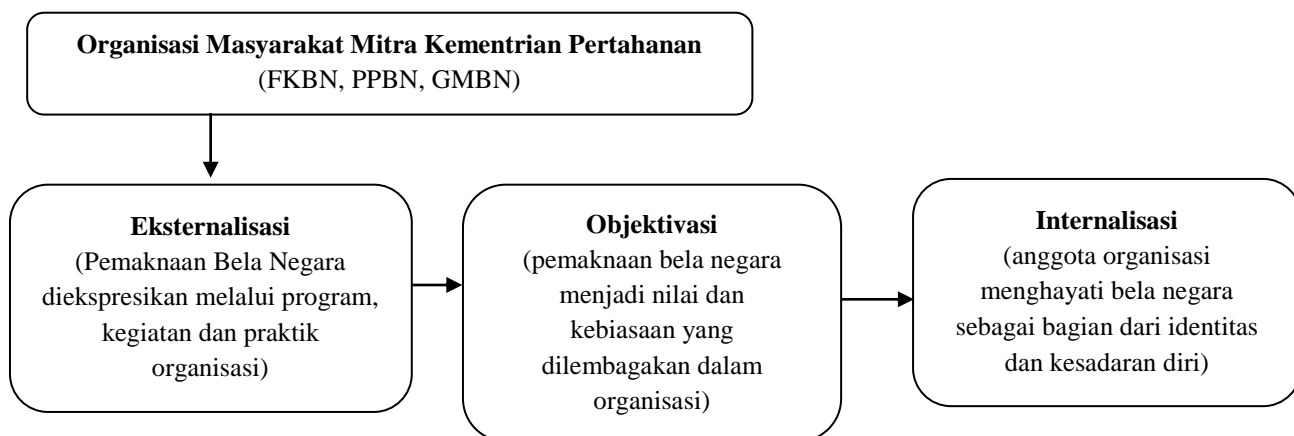
Dengan demikian, sosiologi pertahanan mengajarkan bahwa keamanan nasional tidak hanya dibangun di medan perang, tetapi juga melalui keadilan sosial, kohesi masyarakat, dan partisipasi publik. Pendekatan ini menjembatani kebijakan pertahanan teknis dengan realitas dinamika sosial, menjadikan strategi pertahanan lebih manusiawi, inklusif, dan berkelanjutan serta menegaskan bahwa peran Organisasi Masyarakat merupakan bagian integral dari pertahanan negara.

2.5 Landasan Teori

Penelitian ini menggunakan teori konstruksi sosial atau *The Social Construction of Reality* yang dikemukakan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann (1966) sebagai kerangka analisis utama untuk memahami bagaimana nilai Bela Negara dibangun, dilembagakan, dan dihayati dalam konteks organisasi masyarakat mitra Kementerian Pertahanan. Teori ini berangkat dari asumsi bahwa realitas sosial tidak bersifat alamiah atau *given*, melainkan terbentuk melalui proses sosial yang berlangsung secara terus-menerus melalui interaksi, pengalaman, dan tindakan para aktor sosial.

Berger dan Luckmann (1966) menjelaskan bahwa konstruksi realitas sosial berlangsung melalui tiga momen dialektis, yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Eksternalisasi merupakan proses ketika individu atau kelompok mengekspresikan makna subjektif, ide, dan nilai ke dalam dunia sosial melalui

tindakan nyata. Objektivasi terjadi ketika ekspresi tersebut dilembagakan, diulang, dan dipahami sebagai kenyataan yang relatif objektif dan berada di luar kehendak individu. Sementara itu, internalisasi merupakan proses ketika realitas objektif tersebut kembali diserap ke dalam kesadaran individu dan membentuk cara pandang, sikap, serta identitas subjektif.



Gambar 2. Proses Konstruksi Sosial Nilai Bela Negara dalam Organisasi Masyarakat Mitra Kementerian Pertahanan

Sumber: diolah penulis berdasarkan Berger dan Luckmann (1966).

Dalam konteks penelitian ini, ketiga proses tersebut dipahami terutama berlangsung di dalam organisasi masyarakat mitra Kementerian Pertahanan, yaitu Forum Kader Bela Negara (FKBN), Pemuda Pemudi Bela Negara (PPBN), dan Generasi Muda Bela Negara (GMBN). Organisasi masyarakat diposisikan sebagai ruang sosial utama tempat nilai Bela Negara diproduksi, dilembagakan, dan diinternalisasi oleh para aktor organisasi, khususnya pimpinan dan anggota aktif.

Proses eksternalisasi dalam penelitian ini tampak ketika organisasi masyarakat mengekspresikan pemaknaan subjektif mereka tentang Bela Negara ke dalam berbagai program, kegiatan, dan praktik organisasi, seperti kaderisasi, pelatihan, kegiatan sosial, serta penggunaan simbol dan istilah tertentu. Nilai Bela Negara tidak hanya dipahami sebagai konsep normatif negara, tetapi diolah dan disesuaikan dengan karakter organisasi serta kebutuhan sosial yang dihadapi.

Selanjutnya, objektivasi terjadi ketika praktik dan pemaknaan tersebut dijalankan secara berulang dan konsisten, sehingga membentuk pola, aturan, dan kebiasaan organisasi yang dipahami sebagai sesuatu yang wajar dan sah. Pada tahap ini, nilai Bela Negara hadir sebagai kenyataan organisasi yang mengikat anggota, tidak lagi bergantung pada kehendak individu tertentu, tetapi dilembagakan dalam struktur, mekanisme, dan budaya organisasi.

Proses internalisasi dalam penelitian ini terutama diamati pada tingkat anggota organisasi masyarakat. Nilai Bela Negara yang telah terobjektivasi kemudian diserap melalui proses sosialisasi sekunder, keterlibatan intens dalam aktivitas organisasi, serta interaksi sosial antaranggota. Melalui proses ini, nilai Bela Negara tidak hanya dipahami secara kognitif, tetapi membentuk identitas subjektif anggota sebagai bagian dari komunitas Bela Negara. Internalisasi pada masyarakat luas dipahami secara indikatif, sejauh tersentuh oleh interaksi dan kegiatan organisasi, namun tidak menjadi fokus utama analisis karena keterbatasan subjek penelitian.

Dengan demikian, teori konstruksi sosial Berger dan Luckmann (1966) digunakan dalam penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana organisasi masyarakat mitra Kemhan berfungsi sebagai ruang konstruksi sosial nilai Bela Negara. Melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi yang berlangsung di dalam organisasi, nilai Bela Negara tidak hanya diproduksi dan dipelihara, tetapi juga disiapkan untuk berinteraksi dengan lingkungan sosial yang lebih luas dalam kerangka pertahanan non-militer.

2.6 Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan memiliki relevansi dengan topik penelitian ini. Melalui kajian ini, peneliti dapat mengetahui perkembangan penelitian di bidang yang sama, menemukan persamaan dan perbedaan fokus kajian, serta mengidentifikasi celah (gap) yang belum banyak

dibahas. Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan peran masyarakat sipil dan isu pertahanan non-militer disajikan pada Tabel 1. berikut.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Peneliti & Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian ini
1.	Hamid, N. A., Bastari, Purwanto, S. A., Almubaroq, H. Z., & Yanto, S. (2025) <i>Optimalisasi Pemberdayaan Potensi Organisasi Kemasyarakatan di Kota Bandung dalam Upaya Pertahanan Negara</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Organisasi Masyarakat telah menjalankan program pelatihan kepemimpinan, wawasan kebangsaan, dan kedisiplinan melalui bimbingan institusi pertahanan. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah minimnya sinergi dengan pemerintah dan kurangnya pemanfaatan teknologi digital dalam memperluas jangkauan pemberdayaan. Oleh karena itu, diperlukan strategi peningkatan kapasitas melalui pelatihan berkelanjutan, kolaborasi lintas sektor, serta optimalisasi media digital sebagai alat edukasi dan advokasi	penelitian sebelumnya memberikan gambaran umum tentang pemberdayaan Organisasi Masyarakat di Kota Bandung untuk pertahanan negara dan tantangan yang dihadapi, namun dalam penelitian skripsi ini akan menyelam lebih dalam ke dalam mekanisme kemitraan, implementasi, dan pemaknaan bela negara oleh tiga Organisasi Masyarakat spesifik yang bekerja sama langsung dengan Kemhan, dari perspektif sosiologi pertahanan dan data lapangan yang bersifat <i>bottom-up</i> .
2.	Pratiwi, A., Putri, A. L., Bahirah, H. I., & Syahnanda, R. (2022) <i>Peran Masyarakat Sipil dalam Menanggulangi</i>	COVID-19 adalah ancaman non-militer yang kompleks dan berdampak luas, sehingga peran serta masyarakat sipil sangat vital dan tidak tergantikan dalam	Penelitian sebelumnya membahas konteks umum tentang peran masyarakat sipil dalam menghadapi ancaman non-militer (COVID-19) dan interaksinya dengan pemerintah (termasuk

	<i>COVID-19 sebagai Ancaman Non-Militer di Indonesia</i>	upaya penanggulangannya, meskipun masih dihadapkan pada tantangan terkait kesadaran dan kedisiplinan masyarakat itu sendiri. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat adalah kunci utama untuk mengatasi ancaman ini demi keamanan nasional dan kelangsungan hidup masyarakat	Kemhan), yang relevan sebagai landasan teoritis atau penelitian terdahulu. Namun, skripsi dalam penelitian ini memiliki fokus yang jauh lebih spesifik pada organisasi masyarakat, kemitraan mereka dengan Kemhan, serta menggunakan data lapangan dan perspektif sosiologi pertahanan untuk membahas kesadaran bela negara secara lebih mendalam.
3.	Herdiansah, A. G., & Randi. (2016) <i>Peran Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Menopang Pembangunan di Indonesia</i>	Organisasi Masyarakat/LSM tidak hanya menjadi penghubung dan penyeimbang kekuatan rakyat berhadapan dengan negara, tetapi juga memberikan kontribusi positif sebagai mitra pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dan upaya-upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Eksistensi dan kredibilitas mereka menjadi kunci dalam menghadapi tantangan yang ada	Penelitian sebelumnya adalah kajian literatur yang lebih luas, menganalisis peran umum Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam menopang pembangunan di Indonesia secara keseluruhan, menyoroti fungsi mereka sebagai pilar demokrasi dan tantangan yang dihadapi. Namun dalam skripsi ini menggunakan penelitian empiris yang sangat spesifik dan mendalam dengan Perspektif Tiga Organisasi Masyarakat yang bermitra dengan Kementerian Pertahanan (Kemhan RI) dalam menjalankan Program

			Kesadaran Bela Negara di masyarakat.
4.	Erwinsyahbana, T., Ramlan, Yusrizal, M., Minin, A. R., & Syahbana, T. R. F. (2024) <i>Strategi Pembinaan Kesadaran Bela Negara pada FKPPPI sebagai Organisasi Kemasyarakatan dan Komponen Pendukung Pertahanan Negara</i>	Menekankan peran Ormas dalam pembinaan kesadaran bela negara, terutama komitmen elemen bangsa termasuk organisasi masyarakat (Ormas) dalam meningkatkan kesadaran bela negara. Dan memiliki focus pada bela negara dan peran Ormas dalam konteks wawasan bela negara	Perbedaan dengan skripsi ini terletak pada ruang lingkup objek, fokus analisis, dan pendekatan teoritik. Penelitian Strategi Pembinaan Kesadaran Bela Negara pada FKPPPI hanya mengkaji satu organisasi masyarakat dengan penekanan pada strategi pembinaan secara normatif dan operasional dalam mendukung sistem pertahanan negara, serta belum menggunakan teori konstruksi sosial sebagai kerangka analisis. Sementara itu, skripsi ini mengkaji tiga organisasi masyarakat mitra Kementerian Pertahanan (FKBN, PPBN, dan GMBN) dengan fokus pada bagaimana nilai-nilai bela negara dikonstruksi secara sosial melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi, sekaligus menelaah harapan, tantangan, dan temuan lapangan dari perspektif sosiologi pertahanan.
5.	Aria, N. (2025) <i>The Power of Ideas: A</i>	Penelitian ini menunjukkan bahwa konsep keamanan tidak	Penelitian ini bersifat teoretis dan berfokus pada kajian keamanan

	<i>Constructivist Reinterpretation of Security in International Relations</i>	bersifat objektif dan material semata, melainkan merupakan hasil konstruksi sosial yang dibentuk oleh ide, norma, identitas, dan wacana para aktor. Keamanan dipahami sebagai produk interaksi sosial dan kesepakatan makna bersama dalam konteks politik dan hubungan internasional.	dalam hubungan internasional secara umum, tanpa melibatkan data empiris lapangan serta tidak membahas konteks bela negara di Indonesia maupun peran organisasi masyarakat mitra Kementerian Pertahanan. Sementara itu, penelitian ini menggunakan teori konstruksi sosial untuk menganalisis temuan lapangan terkait konstruksi nilai kesadaran bela negara dalam organisasi masyarakat mitra Kemhan.
--	---	---	---

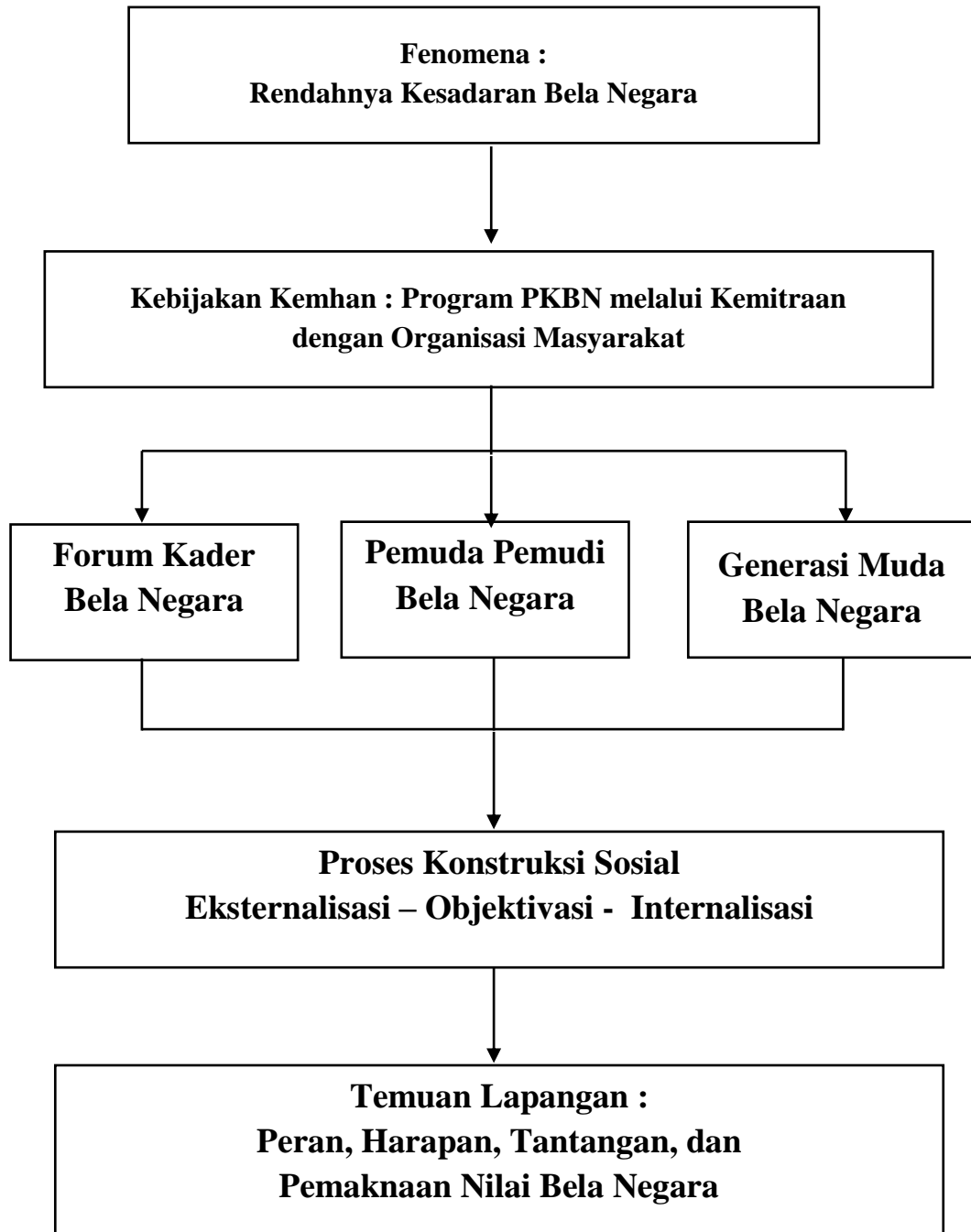
Berdasarkan Tabel 1, dapat dilihat bahwa penelitian-penelitian terdahulu telah mengkaji peran masyarakat sipil dan organisasi kemasyarakatan dalam berbagai konteks, mulai dari penanggulangan ancaman non-militer seperti COVID-19, peran Ormas dan LSM dalam pembangunan, hingga kontribusi organisasi masyarakat dalam mendukung pertahanan negara dan pembinaan kesadaran bela negara. Secara umum, penelitian-penelitian tersebut menegaskan pentingnya kolaborasi antara negara dan masyarakat sipil, serta posisi strategis organisasi masyarakat sebagai mitra pemerintah. Namun, sebagian besar kajian masih bersifat umum, normatif, atau terbatas pada satu organisasi dan satu wilayah tertentu, serta belum sepenuhnya menggali makna bela negara dari perspektif aktor di tingkat lapangan.

Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan mengkaji secara lebih spesifik tiga organisasi masyarakat mitra Kementerian Pertahanan RI, yaitu FKBN, PPBN, dan GMBN. Berbeda dari penelitian sebelumnya, studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif sosiologis, sehingga mampu menelaah peran organisasi masyarakat, harapan yang dibangun, serta

tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan nilai-nilai kesadaran bela negara di tengah masyarakat. Melalui kerangka Teori Konstruksi Sosial, penelitian ini berupaya memahami bagaimana nilai-nilai bela negara dikonstruksi, dimaknai, dan direproduksi melalui praktik sosial para aktor organisasi, sehingga memberikan pemahaman yang lebih kontekstual mengenai hubungan negara dan masyarakat sipil dalam kerangka pertahanan negara pada level praksis dan pemaknaan sosial.

2.7 Kerangka Berpikir Penelitian

Kerangka berpikir penelitian ini menggambarkan alur logika yang digunakan peneliti untuk memahami hubungan antara fenomena rendahnya kesadaran bela negara dengan kebijakan yang diambil oleh Kementerian Pertahanan (Kemhan) melalui Program Kesadaran Bela Negara (PKBN) yang dilaksanakan melalui kemitraan dengan organisasi masyarakat. Tiga organisasi mitra Kemhan yang menjadi fokus penelitian ini adalah Forum Kader Bela Negara, Pemuda Pemudi Bela Negara, dan Generasi Muda Bela Negara. Melalui kerangka berpikir ini, ditunjukkan bagaimana program tersebut diimplementasikan, diinterpretasikan, dan diinternalisasikan oleh aktor-aktor di lapangan dalam konteks proses konstruksi sosial.



Gambar 2. Kerangka Berpikir Penelitian

Melalui kerangka berpikir ini, penelitian diarahkan untuk mengidentifikasi harapan, tantangan, serta pemaknaan nilai bela negara oleh ketiga organisasi masyarakat mitra Kemhan. Dengan memadukan kerangka teoritis konstruksi sosial dan temuan empiris di lapangan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai peran kemitraan negara-masyarakat dalam meningkatkan kesadaran bela negara.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pemilihan pendekatan ini dilandasi oleh tujuan penelitian untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan utuh mengenai implementasi Program Kesadaran Bela Negara pada tingkat organisasi kemasyarakatan. Pendekatan kualitatif dipandang tepat karena mampu mengeksplorasi fenomena dalam konteksnya yang alamiah, sehingga kekhasan dan kompleksitas yang terjadi pada masing-masing Organisasi Masyarakat dapat terungkap.

Fokus penelitian ini adalah pada proses, pemaknaan, dan pengalaman para aktor (pengurus Organisasi Masyarakat) dalam menjalankan program. Oleh karena itu, pendekatan ini lebih sesuai dibandingkan dengan pendekatan kuantitatif, yang lebih berorientasi pada hasil yang terukur dan generalisasi. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini dapat menyelami secara rinci bagaimana nilai-nilai bela negara dipahami, diinternalisasi, dan diwujudkan dalam praktik sehari-hari.

Pendekatan ini juga memberi ruang yang cukup fleksibel dalam pengumpulan data, misalnya melalui wawancara mendalam, observasi, dan kajian dokumen. Lewat cara ini, berbagai sudut pandang dan nuansa yang ada di lapangan bisa tertangkap dengan lebih utuh, yang memang menjadi inti dari fenomena sosial yang diteliti. Dalam konteks ini, perbedaan cara penerapan antar Organisasi Masyarakat tidak dilihat sebagai kendala, melainkan sebagai temuan yang justru memperkaya analisis karena mencerminkan dinamika sosial dan budaya yang khas.

Oleh karena itu, pendekatan kualitatif dipilih untuk memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai tantangan, peluang, serta strategi dalam implementasi program, sebagaimana yang benar-benar terjadi di lapangan.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 26 Oktober sampai dengan 1 November 2025. Jakarta dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan pusat kegiatan dan koordinasi tiga organisasi masyarakat mitra Kementerian Pertahanan Republik Indonesia yang menjadi objek kajian, yaitu Forum Kader Bela Negara (FKBN), Pemuda Pemuda Bela Negara (PPBN), dan Generasi Muda Bela Negara (GMBN).

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumentasi yang dilaksanakan di lokasi yang telah disepakati bersama informan, seperti sekretariat dan kantor organisasi masyarakat terkait di wilayah DKI Jakarta. Meskipun pengumpulan data penelitian ini berlangsung dalam rentang waktu tertentu, prosesnya didukung oleh pemahaman konteks dan akses lapangan yang memadai. Hal ini tidak terlepas dari keterlibatan peneliti dalam kegiatan magang di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia selama kurang lebih lima bulan, baik sebelum maupun selama pelaksanaan penelitian, sehingga peneliti memiliki kedekatan dengan konteks lapangan yang diteliti.

Pemilihan lokasi dan waktu penelitian tersebut memungkinkan penelitian ini memperoleh data yang relevan dan mendalam terkait perspektif organisasi masyarakat serta tantangan yang dihadapi dalam mendukung Program Kesadaran Bela Negara.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian menjadi titik utama yang menentukan arah sebuah penelitian. Fokus ini berfungsi untuk membatasi ruang lingkup kajian sekaligus mengarahkan seluruh proses penelitian agar tetap pada jalurnya. Dengan adanya

fokus yang jelas, penelitian dapat berjalan lebih terarah, sistematis, dan efisien, mulai dari tahap pengumpulan data hingga analisis.

Dalam penelitian kualitatif, penetapan fokus menjadi hal yang penting karena fenomena sosial yang dikaji bersifat kompleks, menyeluruh, dan saling berkaitan. Meskipun pendekatan kualitatif tidak terikat pada variabel yang kaku, tanpa fokus yang jelas data yang dikumpulkan berisiko melebar dan tidak lagi relevan dengan rumusan masalah penelitian.

Berdasarkan judul penelitian “Tiga Organisasi Masyarakat Mitra Kemhan dan Kesadaran Bela Negara: Antara Harapan, Tantangan, dan Temuan Lapangan Sosiologi Pertahanan”, fokus penelitian ini dirumuskan dalam tiga poin utama:

1. Menganalisis peran FKBN, PPBN, dan GMBN sebagai organisasi masyarakat mitra Kementerian Pertahanan dalam mendukung dan menjalankan Program Kesadaran Bela Negara (PKBN).
2. Mengidentifikasi dan menganalisis harapan serta tantangan sosial dan kelembagaan yang dihadapi organisasi masyarakat dalam proses pelaksanaan dan penanaman nilai Bela Negara di masyarakat.
3. Menganalisis bagaimana nilai-nilai Bela Negara dimaknai dalam praktik organisasi, serta bagaimana proses pembentukan dan penanaman nilai tersebut berlangsung dalam pengalaman keorganisasian.

3.4 Informan Penelitian

Dalam penelitian ini, informan penelitian ditetapkan sebagai sumber utama data untuk memperoleh informasi yang relevan dan mendalam sesuai dengan tujuan penelitian. Peneliti tidak memilih informan secara acak, melainkan menetapkannya secara sengaja dengan mempertimbangkan pengalaman, pengetahuan, serta keterlibatan langsung informan dalam kegiatan organisasi masyarakat mitra Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan Program Kesadaran Bela Negara. Penetapan informan dengan cara ini dilakukan agar data yang diperoleh tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi

juga mampu menggambarkan dinamika dan konteks pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Penelitian ini melibatkan dua belas informan dari tiga organisasi masyarakat mitra Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, yaitu Forum Kader Bela Negara (FKBN), Pemuda Pemuda Bela Negara (PPBN), dan Generasi Muda Bela Negara (GMBN). Masing-masing organisasi diwakili oleh empat informan. Seluruh informan memiliki keterlibatan langsung dalam kegiatan Bela Negara dan telah aktif dalam organisasinya minimal selama satu tahun.

Para informan yang diwawancarai dipandang memiliki pemahaman yang memadai mengenai proses pelaksanaan, tantangan yang dihadapi, serta dinamika internal organisasi dalam mendukung Program Kesadaran Bela Negara. Selain itu, informan juga bersedia meluangkan waktu untuk mengikuti wawancara mendalam dan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Dengan demikian, data yang diperoleh diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh dan kontekstual sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian.

Tabel 2. Profil Informan Penelitian

No	Nama	Jenis Kelamin	Usia	Organisasi Masyarakat	Jabatan
1.	ES	L	38	FKBN	Sekretaris Utama
2.	ST	L	42	FKBN	Kepala Bagian Umum
3.	KV	L	43	FKBN	Anggota Kogaphan
4.	AR	L	32	FKBN	Asisten Logistik
5.	AL	P	41	PPBN	Ketua Umum
6.	SN	P	27	PPBN	Ketua Bidang Ketahanan Pangan
7.	AD	P	29	PPBN	Kabid Sosial
8.	MD	L	30	PPBN	Kabid Hukum & HAM
9.	AW	L	50	GMBN	Sekretrais Jenderal

10.	SY	L	53	GMBN	Ketua Bidang Edukasi
11.	EW	L	56	GMBN	Koordinator Bidang
12.	DY	L	41	GMBN	Bidang Tanggap Bencana

Sumber: diolah peneliti, 2026

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu wawancara mendalam, observasi nonpartisipatif, dan dokumentasi.

1. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui interaksi langsung antara peneliti dan partisipan penelitian dengan tujuan menggali informasi secara rinci dan mendalam (Ardiansyah et al., 2023). Dalam penelitian ini, wawancara mendalam dilakukan dengan pengurus dan anggota organisasi masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan Program Kesadaran Bela Negara (PKBN). Melalui teknik ini, peneliti berupaya memahami secara lebih utuh pandangan, pengalaman, serta tantangan yang dihadapi organisasi masyarakat dalam mendukung dan melaksanakan program tersebut.

Wawancara dilakukan secara tatap muka dan dilaksanakan di lokasi yang disepakati bersama informan, seperti kantor sekretariat masing-masing organisasi masyarakat maupun tempat lain yang diinginkan oleh informan. Pelaksanaan wawancara secara langsung memungkinkan peneliti membangun interaksi yang lebih terbuka sehingga informan dapat menyampaikan pengalaman dan pandangannya secara lebih leluasa.

Instrumen penelitian yang digunakan dalam proses wawancara meliputi panduan wawancara, alat perekam suara, serta catatan lapangan. Panduan wawancara disusun secara fleksibel, sehingga meskipun terdapat

pertanyaan pokok yang mengacu pada fokus penelitian, informan tetap diberikan ruang untuk mengembangkan jawaban sesuai dengan pengalaman dan konteks yang mereka alami. Selain itu, catatan lapangan digunakan untuk mencatat hal-hal penting yang muncul selama wawancara, termasuk ekspresi, situasi, dan konteks percakapan yang tidak terekam secara audio, guna memperkaya data penelitian.

Jadwal dan Lokasi Wawancara 12 Informan

- a. Informan ES: Gedung Nyi Ageng Serang, Jl. H. R. Rasuna Said No. 22, Setia Budi, Kota Jakarta Selatan, 29 Oktober 2025, Pukul 10.00 WIB
- b. Informan ST: Gedung Nyi Ageng Serang, Jl. H. R. Rasuna Said No. 22, Setia Budi, Kota Jakarta Selatan, 29 Oktober 2025, Pukul 12.00 WIB
- c. Informan AL : Gedung Veteran RI Jl. Jenderal Sudirman No.Kav.50, Setia Budi, Kota Jakarta Selatan, 31 Oktober 2025, Pukul 09.00 WIB
- d. Informan SN: Gedung Veteran RI Jl. Jenderal Sudirman No.Kav.50, Setia Budi, Kota Jakarta Selatan, 31 Oktober 2025, Pukul 11.00 WIB
- e. Informan AW: Jl Tanah Abang I No.19, Petojo, Kec Gambir, Kota Jakarta Pusat, 30 Oktober 2025, Pukul 13.00 WIB
- f. Informan SH: Jl Tanah Abang I No.19, Petojo, Kec Gambir, Kota Jakarta Pusat, 30 Oktober 2025, Pukul 14.00 WIB
- g. Informan EW: Jl Tanah Abang I No.19, Petojo, Kec Gambir, Kota Jakarta Pusat, 30 Oktober 2025, Pukul 15.00 WIB
- h. Informan KV: Wawancara dilakukan secara daring melalui Google Meet pada 13 April 2026, pukul 09.00–09.35 WIB.
- i. Informan AR: Wawancara dilakukan secara daring melalui Google Meet pada 13 April 2026, pukul 09.40–10.15 WIB.
- j. Informan AD: Wawancara dilakukan secara daring melalui Google Meet pada 13 April 2026, pukul 13.00–13.35 WIB.
- k. Informan MD: Wawancara dilakukan secara daring melalui Google Meet pada 13 April 2026, pukul 13.40–14.15 WIB.

1. Informan DY: Wawancara dilakukan secara daring melalui Google Meet pada 13 April 2026, pukul 14.20–14.55 WIB.

2. Observasi

Observasi dilakukan dengan metode nonpartisipatif, yaitu peneliti hadir di lokasi penelitian namun tidak terlibat langsung dalam aktivitas organisasi. Observasi difokuskan pada situasi saat wawancara berlangsung, mencakup kondisi lingkungan organisasi, suasana kantor, serta atribut atau simbol bela negara yang ditampilkan. Tujuan observasi adalah memperoleh data pendukung yang dapat memperkuat hasil wawancara dan memberikan gambaran kontekstual mengenai aktivitas organisasi.

Tabel 3. Pedoman Observasi

No	Aspek yang Diamati	Hasil Observasi
1	Kondisi Sekretarian	Suasana sekretariat formal dan tertata rapi. Ruangannya dilengkapi meja dan kursi yang cukup luas untuk kegiatan rapat. Kondisi ruangan bersih dan terorganisir. Terdapat papan tulis yang digunakan untuk mencatat rencana kegiatan, jadwal, dan evaluasi organisasi.
2.	Suasana Aktifitas Organisasi	Suasana organisasi terlihat kekeluargaan dan saling menghormati. Anggota bersikap ramah, memberikan jamuan kepada peneliti, serta terbuka dalam proses wawancara.
3.	Atribut atau Simbol Bela Negara	Terdapat berbagai atribut bela negara seperti lambang Pancasila, logo organisasi, pajangan seragam, serta piala dan sertifikat penghargaan yang dipajang di ruangan organisasi.
4.	Media Informasi Organisasi	Media informasi organisasi menggunakan platform digital. FKBN memiliki website resmi, PPBN aktif melalui Instagram (@ppbn_ri), serta komunikasi internal dilakukan melalui grup

WhatsApp yang terlihat aktif digunakan untuk koordinasi kegiatan.

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2025)

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data sekunder yang relevan dari tempat penelitian maupun sumber lain yang mendukung. Dokumen yang dikaji meliputi buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan, laporan kegiatan organisasi, arsip internal, foto, brosur, maupun publikasi resmi lainnya yang berkaitan dengan aktivitas bela negara. Data hasil dokumentasi berfungsi sebagai pelengkap sekaligus penguat temuan dari wawancara dan observasi, sehingga memberikan dasar analisis yang lebih komprehensif.

Tabel 4. Studi Dokumentasi

No	Jenis	Judul
1.	Dokumen Kementrian	Resmi Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Bela Negara Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pembinaan Kesadaran Bela Negara Kebijakan Bela Negara Kementerian Pertahanan RI Modul Bela Negara Ditjen Potensi Pertahanan Modul WIRA Edisi Khusus Bela Negara
2.	Website Organisasi	Website Forum Kader Bela Negara (FKBN)
3.	Media Sosial	Instagram Pemuda Pemudi Bela Negara (@ppbn_ri), dan Instagram Generasi Muda Bela Negara (@gmbn_ri)
4.	Dokumen Organisasi	Profil Organisasi

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga (AD/ART) Organisasi
Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)
Kegiatan Organisasi

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2025)

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif ini menggunakan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1994). Pemilihan model ini sangat sesuai di mana data yang dikumpulkan dari tiga Organisasi Masyarakat (FKBN, PPBN, dan GMBN) bersifat kompleks, kaya makna, dan membutuhkan proses analisis yang sistematis namun fleksibel. Model ini dipandang penting karena tidak hanya memberikan dasar konseptual yang kuat, tetapi juga menawarkan strategi praktis bagi peneliti untuk menganalisis data secara sistematis. Dalam penelitian kualitatif, data biasanya berbentuk teks atau narasi yang kaya makna. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan analisis yang mampu mereduksi kompleksitas data tanpa menghilangkan kedalaman informasi Organisasi Masyarakat yang terkandung di dalamnya (Miles & Huberman, 1994).

Model Miles dan Huberman menjawab kebutuhan tersebut melalui tiga komponen analisis utama yang berlangsung secara simultan, interaktif, dan berulang. Proses ini menekankan bahwa analisis data bukanlah kegiatan linear, melainkan suatu rangkaian yang saling memengaruhi sepanjang penelitian (Miles & Huberman, 1994). Sifatnya yang iteratif dan non-linear ini memungkinkan peneliti untuk secara dinamis beralih antar kasus dan terus-menerus menyempurnakan pemahaman terhadap temuan lapangan. Adapun tiga komponen utama tersebut adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data mentah yang diperoleh dari catatan lapangan, wawancara, atau dokumentasi (Miles & Huberman, 1994). Dalam konteks penelitian ini, proses reduksi telah dimulai sejak awal dengan menentukan fokus pada kontribusi, tantangan, dan pemaknaan nilai bela negara oleh tiga Organisasi Masyarakat. Proses ini sudah dimulai bahkan sebelum data terkumpul sepenuhnya, ketika peneliti menentukan kerangka konseptual, fokus penelitian, dan metode pengumpulan data yang akan digunakan.

Selama pengumpulan data, reduksi dilakukan secara berkesinambungan melalui berbagai teknik seperti pembuatan ringkasan hasil wawancara, penelusuran tema, pengelompokan data ke dalam kategori tertentu (misalnya: kategori bentuk kontribusi, jenis tantangan, pemaknaan nilai bela negara), serta penulisan memo analitis.

Tujuan utama dari reduksi data adalah untuk mempertahankan Organisasi Masyarakat yang relevan dan bermakna saja, sehingga memudahkan proses analisis pada tahap selanjutnya (Miles & Huberman, 1994). Proses ini bersifat selektif dan transformatif, di mana data yang tidak esensial disingkirkan sementara data yang penting dipertahankan dan diorganisir.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan tahap lanjutan setelah proses reduksi data, di mana data yang telah dipilih dan difokuskan disusun ke dalam bentuk yang terstruktur agar mudah dipahami. Dalam penelitian ini, data disajikan dalam bentuk uraian naratif yang didukung oleh kutipan langsung dari hasil wawancara dengan informan. Penyajian data ini bertujuan untuk menggambarkan pandangan, pengalaman, serta dinamika yang muncul dalam pelaksanaan Program Kesadaran Bela Negara pada masing-masing organisasi masyarakat.

Sejalan dengan pandangan Miles dan Huberman, penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti teks

naratif, tabel, matriks, grafik, jaringan, atau bagan, sesuai dengan karakter dan kebutuhan data penelitian. Dalam konteks penelitian ini, penyajian data secara naratif memungkinkan peneliti untuk menampilkan temuan lapangan secara lebih utuh dan kontekstual, terutama dalam menangkap makna serta proses yang dialami oleh organisasi masyarakat.

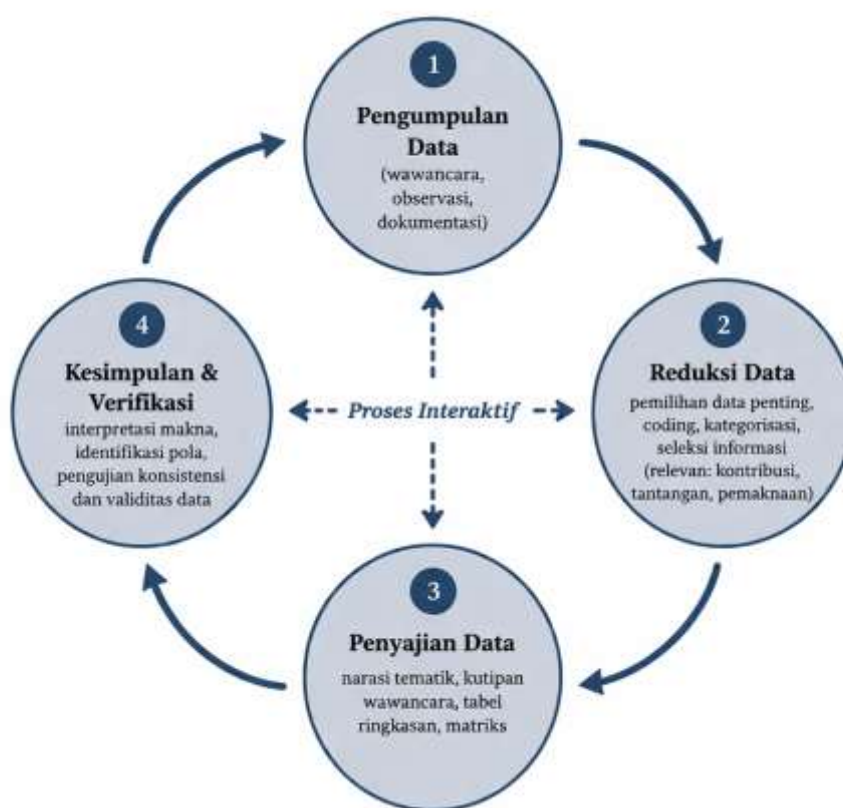
Penyajian data yang disusun secara sistematis membantu peneliti dalam melihat pola, keterkaitan antar tema, serta temuan-temuan penting yang muncul dari data lapangan. Selain itu, penyajian data yang didukung oleh kutipan langsung dari informan juga berperan dalam menjaga validitas analisis, karena memungkinkan pembaca menelusuri hubungan antara temuan penelitian dan data empiris yang mendasarinya, sehingga proses analisis menjadi lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan tahap akhir dalam proses analisis data, yang dilakukan dengan memberi makna terhadap data yang telah direduksi dan disajikan. Sejak proses pengumpulan data berlangsung, peneliti secara bertahap mulai membaca pola, kecenderungan, serta makna yang muncul dari hasil wawancara dan catatan lapangan. Data yang telah direduksi kemudian dikelompokkan ke dalam beberapa bagian tematik, seperti peran, kontribusi, tantangan, harapan, implementasi nilai, dan pemaknaan terhadap Program Kesadaran Bela Negara.

Melalui pengelompokan tematik tersebut, peneliti menyusun pemahaman awal mengenai bagaimana masing-masing organisasi masyarakat memaknai dan menjalankan perannya dalam konteks Bela Negara. Kesimpulan tidak ditarik secara sekaligus, melainkan dibangun melalui proses pembacaan berulang dan pendalaman terhadap data pada setiap tema, sehingga makna yang dihasilkan tetap berpijak pada pengalaman dan pandangan informan. Dari proses ini kemudian dirumuskan tema-tema utama yang secara substantif menjawab rumusan masalah penelitian.

Proses verifikasi dilakukan dengan meninjau kembali keterkaitan antara data hasil wawancara, kategori tematik yang telah disusun, serta konteks lapangan yang melatarbelakanginya. Peneliti secara berulang mencocokkan kutipan-kutipan wawancara dengan tema yang dibangun untuk memastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan konsisten dan memiliki dasar empiris yang jelas. Dengan cara ini, kesimpulan yang diperoleh diharapkan mampu merepresentasikan realitas yang diteliti secara utuh dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.



Gambar 3. Model Analisis Data Interaktif Miles dan Huberman

Sumber: Diolah dari Miles & Huberman (1994)

Ketiga komponen analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi, tidak berlangsung sebagai tahap-tahap yang berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan berjalan secara interaktif sepanjang proses penelitian. Proses analisis dilakukan secara berulang, di mana hasil dari satu tahapan dapat mendorong peneliti untuk kembali ke tahapan lainnya. Misalnya, temuan yang muncul pada saat

penyajian data dapat mengarahkan peneliti untuk melakukan reduksi ulang atau pendalaman pengkodean agar data yang diperoleh semakin tajam.

Pendekatan ini menjadikan analisis data kualitatif sebagai proses yang bersifat fleksibel, namun tetap memiliki alur dan struktur metodologis yang jelas. Dengan menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai peran, tantangan, serta dinamika organisasi masyarakat dalam mendukung Program Kesadaran Bela Negara, sekaligus menjawab ketiga rumusan masalah yang telah ditetapkan.

IV. GAMBARAN UMUM PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta menjadi lokasi penelitian ini karena memiliki posisi strategis dalam konteks kelembagaan dan aktivitas kebangsaan di tingkat nasional. Sebagai pusat pemerintahan negara, Jakarta merupakan tempat beroperasinya berbagai kementerian dan lembaga negara, termasuk Kementerian Pertahanan Republik Indonesia yang menjadi aktor utama dalam perumusan dan pelaksanaan Program Kesadaran Bela Negara. Kondisi tersebut menjadikan Jakarta sebagai ruang sosial yang mempertemukan negara, organisasi masyarakat, dan warga dalam berbagai bentuk interaksi programatik dan pembinaan nilai kebangsaan.

Secara administratif, DKI Jakarta terdiri atas lima kota administrasi dan satu kabupaten administrasi, dengan karakter wilayah metropolitan yang ditandai oleh kepadatan aktivitas pemerintahan, organisasi, dan layanan publik. Lingkungan perkotaan yang terpusat ini mendorong tumbuhnya berbagai organisasi masyarakat dengan latar belakang dan bidang gerak yang beragam, termasuk organisasi yang menjadi mitra pemerintah dalam kegiatan pembinaan nilai kebangsaan. Keberadaan struktur organisasi, jaringan relawan, dan kegiatan pembinaan yang relatif aktif di wilayah Jakarta menjadikan lokasi ini relevan untuk mengamati praktik penanaman nilai Bela Negara dalam konteks organisasi masyarakat.

Karakter sosial Jakarta sebagai wilayah urban dengan mobilitas penduduk yang tinggi dan komposisi masyarakat yang heterogen juga menjadi konteks penting dalam penelitian ini. Interaksi sosial yang dinamis, pola kehidupan yang cepat,

serta keberagaman latar belakang sosial membentuk tantangan sekaligus peluang dalam proses penyampaian dan pemaknaan nilai Bela Negara. Dalam situasi masyarakat perkotaan yang cenderung rasional dan berbasis aktivitas, penanaman nilai kebangsaan melalui organisasi masyarakat menjadi menarik untuk dikaji, terutama dalam melihat bagaimana nilai tersebut diterjemahkan ke dalam kegiatan, pembinaan, dan pengalaman kolektif.

Pemilihan DKI Jakarta sebagai lokasi penelitian juga didasarkan pada pertimbangan akses terhadap informan dan aktivitas organisasi. Tiga organisasi masyarakat mitra Kementerian Pertahanan yang menjadi fokus penelitian FKBN, PPBN, dan GMBN memiliki basis kepengurusan dan aktivitas yang aktif di Jakarta. Hal ini memungkinkan peneliti melakukan wawancara, observasi kegiatan, serta penelusuran praktik organisasi secara lebih mendalam. Dengan demikian, Jakarta tidak hanya berfungsi sebagai lokasi administratif penelitian, tetapi juga sebagai konteks sosial yang relevan untuk memahami peran dan pemaknaan nilai Bela Negara dalam praktik organisasi masyarakat.

4.2 Profil Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI)

4.2.1 Kelembagaan Kemhan RI

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI) merupakan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan negara. Pembentukan lembaga yang menangani sektor pertahanan telah dimulai sejak awal kemerdekaan Indonesia. Pada masa awal pemerintahan Republik Indonesia, urusan pertahanan berada di bawah Kementerian Keamanan Rakyat sebelum kemudian berkembang menjadi Kementerian Pertahanan sebagai institusi yang secara khusus bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Seiring dengan perkembangan sistem pemerintahan dan dinamika politik nasional, kelembagaan pertahanan terus mengalami penyesuaian hingga terbentuk struktur Kementerian Pertahanan sebagaimana dikenal saat ini.

Secara yuridis, kedudukan dan fungsi Kementerian Pertahanan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menegaskan bahwa penyelenggaraan pertahanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, serta sumber daya nasional secara terpadu. Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara menetapkan perubahan nomenklatur Departemen Pertahanan menjadi Kementerian Pertahanan Republik Indonesia sebagai unsur pelaksana pemerintahan di bidang pertahanan. Ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja Kementerian Pertahanan juga diatur lebih lanjut melalui Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kementerian Pertahanan.

Dalam sistem pemerintahan Indonesia, Kementerian Pertahanan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Kementerian ini dipimpin oleh Menteri Pertahanan yang memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan guna membantu Presiden dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan strategis pertahanan negara. Tugas tersebut meliputi perumusan kebijakan pertahanan, perencanaan pembangunan pertahanan, pengelolaan sumber daya pertahanan, serta pembinaan potensi nasional untuk mendukung sistem pertahanan negara yang bersifat semesta.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian Pertahanan menjalankan beberapa fungsi utama, antara lain:

- a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang strategi pertahanan dan perencanaan pertahanan negara.
- b. Pembangunan serta pengembangan kekuatan dan kemampuan pertahanan nasional.
- c. Pengelolaan potensi sumber daya nasional untuk mendukung sistem pertahanan negara.

- d. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pertahanan guna meningkatkan kemampuan teknologi pertahanan.
- e. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang pertahanan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia.
- f. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, serta dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Pertahanan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut secara efektif, Kementerian Pertahanan memiliki struktur organisasi yang terdiri atas beberapa unsur utama, yaitu:

1. Unsur Pembina, yang bertugas memberikan dukungan manajerial, administrasi, serta pengawasan internal, terdiri atas:
 - Sekretariat Jenderal
 - Inspektorat Jenderal
2. Unsur Pelaksana, yang bertanggung jawab langsung dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pertahanan, terdiri atas beberapa Direktorat Jenderal, yaitu:
 - Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan
 - Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan
 - Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan
 - Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan
3. Unsur Pendukung dan Penunjang, yang berfungsi memberikan dukungan teknis, operasional, keilmuan, serta pertimbangan strategis kepada Menteri Pertahanan, meliputi:
 - Badan Sarana Pertahanan
 - Badan Penelitian dan Pengembangan
 - Badan Pendidikan dan Pelatihan
 - Badan Instalasi Strategis Pertahanan
 - Staf Ahli Menteri Pertahanan
 - Pusat-pusat teknis di lingkungan Kementerian Pertahanan

Salah satu unit strategis dalam struktur organisasi Kementerian Pertahanan adalah Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan (Ditjen Pothan). Unit ini memiliki peran penting dalam membina dan mengembangkan potensi sumber daya nasional sebagai bagian dari sistem pertahanan negara yang bersifat semesta. Ditjen Pothan bertanggung jawab dalam pengelolaan komponen cadangan, komponen pendukung, serta pembinaan kesadaran bela negara di kalangan masyarakat.

Dalam konteks pertahanan modern, peran Kementerian Pertahanan tidak hanya terbatas pada aspek militer, tetapi juga mencakup dimensi pertahanan non-militer yang melibatkan partisipasi masyarakat sipil. Melalui Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan, Kementerian Pertahanan melaksanakan berbagai program pembinaan potensi pertahanan yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya bela negara. Salah satu bentuk implementasi dari upaya tersebut adalah Program Kesadaran Bela Negara (PKBN) yang melibatkan berbagai unsur masyarakat, termasuk organisasi masyarakat, dalam upaya menanamkan nilai-nilai nasionalisme, kedisiplinan, serta tanggung jawab warga negara dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4.2.2 Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan (Ditjen Pothan)

Dalam sistem pertahanan negara yang bersifat semesta, penyelenggaraan pertahanan tidak hanya bertumpu pada kekuatan militer, tetapi juga melibatkan partisipasi masyarakat serta pemberdayaan berbagai sumber daya nasional. Untuk mendukung pengelolaan potensi pertahanan tersebut, Kementerian Pertahanan membentuk unit organisasi yang secara khusus bertanggung jawab dalam pembinaan dan pengembangan potensi pertahanan nasional, yaitu Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan (Ditjen Pothan).

Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan merupakan unit organisasi Eselon I di lingkungan Kementerian Pertahanan yang melaksanakan sebagian tugas Kementerian Pertahanan di bidang potensi pertahanan. Secara

umum, Ditjen Potan memiliki peran dalam mengelola dan mengembangkan sumber daya nasional sebagai bagian dari sistem pertahanan negara, termasuk pembinaan kesadaran bela negara di kalangan masyarakat. Keberadaan Ditjen Potan menjadi penting dalam menghubungkan kebijakan pertahanan negara dengan partisipasi masyarakat dalam mendukung upaya pertahanan nasional. (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, n.d.)

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan, Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang potensi pertahanan. Dalam menjalankan tugas tersebut, Ditjen Potan menyelenggarakan berbagai fungsi, antara lain perumusan kebijakan pembinaan sumber daya manusia pendukung pertahanan, pengelolaan komponen cadangan dan komponen pendukung, serta pemantauan dan evaluasi program-program yang berkaitan dengan penguatan potensi pertahanan nasional. (Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019)

Secara organisasi, Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan terdiri atas beberapa unit kerja yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, yaitu:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal
- b. Direktorat Bela Negara
- c. Direktorat Sumber Daya Pertahanan
- d. Direktorat Teknologi dan Industri Pertahanan
- e. Direktorat Veteran

Di antara unit-unit tersebut, Direktorat Bela Negara memiliki peran penting dalam penyelenggaraan program pembinaan kesadaran bela negara di masyarakat. Direktorat ini bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan, menyusun program, serta melaksanakan kegiatan pembinaan yang bertujuan menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap

pentingnya bela negara. Melalui berbagai program pembinaan, Direktorat Bela Negara melibatkan berbagai unsur masyarakat, termasuk organisasi masyarakat dan komunitas pemuda, dalam upaya memperkuat nilai-nilai kebangsaan dan kesiapsiagaan warga negara dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman terhadap negara. (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, n.d.)

4.2.3 Direktorat Bela Negara

Direktorat Bela Negara merupakan unit organisasi eselon II di bawah Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan (Ditjen Potthan) Kementerian Pertahanan Republik Indonesia yang memiliki peran penting dalam pembinaan kesadaran bela negara di masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan, Direktorat Bela Negara memiliki tugas merumuskan, melaksanakan, memantau, serta mengevaluasi kebijakan di bidang penataan dan pembinaan bela negara. (Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019)

Dalam menjalankan tugas tersebut, Direktorat Bela Negara menyelenggarakan berbagai program dan kegiatan yang bertujuan menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya bela negara sebagai bagian dari sistem pertahanan semesta. Melalui kegiatan pembinaan, sosialisasi, serta kerja sama dengan berbagai lembaga dan organisasi masyarakat, Direktorat Bela Negara berupaya memperkuat nilai-nilai nasionalisme, kedisiplinan, serta tanggung jawab warga negara dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara organisasi, Direktorat Bela Negara terdiri atas beberapa unit kerja sebagai berikut:

1. Subdirektorat Lingkungan Pendidikan, yang berfokus pada pembinaan kesadaran bela negara di lingkungan sekolah, perguruan tinggi, dan lembaga pendidikan lainnya.
2. Subdirektorat Lingkungan Pekerjaan, yang melaksanakan pembinaan kesadaran bela negara di lingkungan instansi pemerintah, sektor swasta, serta dunia usaha.
3. Subdirektorat Lingkungan Permukiman, yang berperan dalam pembinaan kesadaran bela negara di tingkat masyarakat umum, komunitas, serta kawasan permukiman.
4. Subbagian Tata Usaha, yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan ketatausahaan direktorat.
5. Kelompok Jabatan Fungsional, yang memberikan dukungan teknis dan substantif sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.

Masing-masing subdirektorat dipimpin oleh seorang kepala subdirektorat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program pembinaan bela negara sesuai dengan lingkup tugasnya. Di antara unit-unit tersebut, Subdirektorat Lingkungan Permukiman memiliki peran penting dalam menjangkau masyarakat secara langsung melalui berbagai kegiatan pembinaan dan kerja sama dengan komunitas serta organisasi kemasyarakatan. Melalui pendekatan tersebut, pembinaan kesadaran bela negara dapat dilaksanakan secara lebih luas dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung sistem pertahanan negara. (Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019)

4.2.4 Program Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN)

Program Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) merupakan salah satu program strategis yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dalam rangka menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya bela negara sebagai bagian dari sistem pertahanan negara. Program ini bertujuan membentuk sikap, pola pikir, serta perilaku warga negara agar memiliki kesadaran untuk berkontribusi dalam menjaga kedaulatan negara sesuai dengan perannya masing-masing

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 27 Tahun 2019)

Urgensi pelaksanaan pembinaan kesadaran bela negara tidak terlepas dari berbagai fenomena sosial yang menunjukkan bahwa kesadaran kebangsaan di kalangan generasi muda masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa melemahnya nilai-nilai bela negara dapat tercermin dari meningkatnya berbagai perilaku menyimpang di kalangan generasi muda, seperti tawuran pelajar, penyalahgunaan narkoba, serta pengaruh ideologi radikal. Data yang dihimpun Komisi Nasional Perlindungan Anak menunjukkan bahwa pada tahun 2014 terdapat 2.737 kasus kekerasan yang melibatkan pelajar, sementara penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar juga menunjukkan angka yang cukup signifikan. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai bela negara belum sepenuhnya terinternalisasi dalam kehidupan generasi muda sehingga dapat berdampak pada melemahnya ketahanan nasional. (Suriata, 2019)

Secara normatif, pelaksanaan PKBN diatur dalam berbagai kebijakan pemerintah, salah satunya melalui Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2022 tentang Kebijakan Pembinaan Kesadaran Bela Negara serta Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 27 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kesadaran Bela Negara. Dalam regulasi tersebut dijelaskan bahwa pembinaan kesadaran bela negara merupakan proses yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan untuk menanamkan nilai-nilai bela negara kepada warga negara melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, sosialisasi, serta pembudayaan nilai kebangsaan di berbagai lingkungan kehidupan masyarakat. (Perpres Nomor 115 Tahun 2022; Permenhan Nomor 27 Tahun 2019)

Nilai dasar yang menjadi landasan dalam pembinaan kesadaran bela negara meliputi cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, kesetiaan kepada Pancasila sebagai ideologi negara, kerelaan berkorban

untuk bangsa dan negara, serta kemampuan awal bela negara. Nilai-nilai tersebut dirancang sebagai fondasi pembentukan karakter warga negara yang memiliki tanggung jawab terhadap keberlangsungan negara. Dengan demikian, pembinaan bela negara tidak hanya berfokus pada peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai pertahanan negara, tetapi juga pada pembentukan sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme dalam kehidupan sehari-hari. (Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 27 Tahun 2019)

Dalam pelaksanaannya, Program Pembinaan Kesadaran Bela Negara dilaksanakan melalui berbagai bentuk kegiatan pembinaan yang menjangkau berbagai kelompok masyarakat. Kegiatan tersebut antara lain berupa sosialisasi nilai bela negara, seminar kebangsaan, pelatihan kader bela negara, diskusi komunitas, workshop kebangsaan, serta kegiatan penguatan karakter kebangsaan di lingkungan pendidikan dan masyarakat. Selain melalui kegiatan tatap muka, pembinaan kesadaran bela negara juga dilakukan melalui media komunikasi seperti publikasi di media massa, kampanye digital, serta penyebaran materi edukasi seperti buku saku, poster, dan video edukasi yang bertujuan memperluas jangkauan penyebaran nilai bela negara di masyarakat. (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2023)

Sebagai upaya untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan pembinaan bela negara, Kementerian Pertahanan juga mengembangkan indikator pengukuran yang dikenal sebagai Indeks Bela Negara (IBN). Indeks ini digunakan untuk mengukur tingkat internalisasi nilai bela negara di berbagai lingkungan kehidupan masyarakat. Berdasarkan publikasi Kementerian Pertahanan melalui Majalah WIRA, tingkat kesadaran bela negara masyarakat Indonesia menunjukkan kategori tinggi hingga sangat tinggi, dengan capaian sekitar 82,03 pada lingkungan pendidikan, 80,55 pada lingkungan pekerjaan, dan 78,12 pada lingkungan masyarakat. Capaian tersebut menunjukkan bahwa berbagai program pembinaan yang dilakukan melalui PKBN telah memberikan kontribusi dalam

memperkuat kesadaran kebangsaan masyarakat. (Majalah WIRA Kementerian Pertahanan, 2024)

Dalam praktik pelaksanaannya, Program Pembinaan Kesadaran Bela Negara tidak hanya dilakukan oleh pemerintah secara langsung, tetapi juga melibatkan berbagai unsur masyarakat sebagai mitra dalam penyebaran nilai-nilai bela negara. Organisasi kemasyarakatan, komunitas pemuda, serta berbagai kelompok masyarakat lainnya berperan dalam membantu proses sosialisasi dan internalisasi nilai bela negara di masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan perhatian pada organisasi kemasyarakatan yang menjadi mitra Kementerian Pertahanan dalam mendukung pelaksanaan Program Pembinaan Kesadaran Bela Negara di lingkungan masyarakat.

4.3 Profil Organisasi Masyarakat Mitra Kemhan RI

4.3.1 Forum Kader Bela Negara

Forum Kader Bela Negara (FKBN) merupakan organisasi masyarakat yang lahir dari dinamika perkembangan ancaman pertahanan di era modern, khususnya meningkatnya ancaman non-militer yang bersifat multidimensional seperti ideologi, sosial budaya, dan disinformasi. Pada periode setelah tahun 2014, pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Bela Negara sebagai respons terhadap perkembangan ancaman tersebut. Dalam rangka mendukung gerakan tersebut, Kementerian Pertahanan sejak tahun 2015 menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Kader Bela Negara yang melibatkan berbagai unsur masyarakat, seperti aparatur sipil negara (ASN), tokoh agama, pemuda, akademisi, serta masyarakat umum. Program tersebut berhasil melahirkan ribuan kader bela negara dari berbagai latar belakang profesi. Namun demikian, para kader yang telah mengikuti pelatihan tersebut belum memiliki wadah organisasi yang mampu menghimpun jaringan kader secara terkoordinasi dan berkelanjutan.

Kondisi tersebut kemudian mendorong para kader untuk melakukan konsolidasi organisasi guna membangun forum bersama yang dapat menjadi sarana koordinasi dan penguatan jaringan kader bela negara. Melalui proses konsolidasi tersebut, pada tanggal 22 Februari 2019 diselenggarakan rapat pembentukan Forum Kader Bela Negara di Kantor Wilayah Kementerian Pertahanan Provinsi DKI Jakarta. Forum ini kemudian secara resmi didirikan sebagai organisasi masyarakat yang berangkat dari inisiatif kader bela negara dengan dukungan dari Kanwil Kementerian Pertahanan. Kehadiran FKBN menjadi upaya untuk menghimpun berbagai kelompok kader bela negara yang sebelumnya berjalan secara terpisah-pisah, sehingga pembinaan dan pengembangan kader dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan terkoordinasi dari tingkat pusat hingga daerah (Forum Kader Bela Negara, n.d.).

Sebagai organisasi yang berorientasi pada penguatan kesadaran bela negara di masyarakat, FKBN memiliki visi untuk membangun insan kader bela negara yang cerdas, waskita, serta memiliki militansi kebangsaan yang kuat dalam rangka memperkokoh sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata) guna menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, FKBN menjalankan berbagai misi organisasi, antara lain menanamkan nilai-nilai dasar bela negara kepada masyarakat, menghimpun dan memberdayakan kader dari berbagai latar belakang profesi, meningkatkan partisipasi masyarakat sipil dalam mendukung pertahanan negara, serta menjalin kemitraan dengan pemerintah, khususnya Kementerian Pertahanan, dalam pelaksanaan Program Pembinaan Kesadaran Bela Negara. Melalui visi dan misi tersebut, FKBN menempatkan masyarakat sipil sebagai elemen penting dalam sistem pertahanan negara yang bersifat semesta.

Dalam menjalankan aktivitas organisasinya, FKBN memiliki struktur organisasi yang bersifat hierarkis dan koordinatif. Pada tingkat nasional, organisasi ini dipimpin oleh Badan Koordinator Pusat (BKP) yang terdiri

atas ketua umum, bidang-bidang strategis, serta kelompok kerja yang bertugas mengelola berbagai program organisasi. Struktur tersebut kemudian diperluas hingga tingkat daerah melalui Badan Koordinator Wilayah (Bakorwil) di tingkat provinsi serta Badan Koordinator Daerah (Bakorda) di tingkat kabupaten dan kota. Struktur organisasi yang berlapis ini memungkinkan FKBN menjalankan pembinaan kader secara lebih efektif dan menyesuaikan program kegiatan dengan kondisi sosial masyarakat di masing-masing daerah (Forum Kader Bela Negara, n.d.).

Kegiatan utama FKBN berfokus pada upaya pembinaan dan penguatan kesadaran bela negara di masyarakat. Kegiatan tersebut antara lain meliputi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bela negara, kegiatan sosialisasi nilai-nilai kebangsaan, diskusi kebangsaan, serta berbagai kegiatan pembinaan karakter yang melibatkan masyarakat dari berbagai latar belakang sosial, budaya, dan profesi. Selain itu, FKBN juga melakukan berbagai kegiatan kajian mengenai dinamika pertahanan negara, khususnya yang berkaitan dengan ancaman non-militer yang berpotensi mempengaruhi ketahanan nasional. Dalam pelaksanaannya, FKBN juga aktif menjalin kemitraan dengan berbagai lembaga, baik pemerintah maupun organisasi masyarakat lainnya, serta mengembangkan media publikasi sebagai sarana sosialisasi nilai bela negara kepada masyarakat luas.

Selain kegiatan yang bersifat edukatif, FKBN juga menjalankan berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan seperti bakti sosial, kegiatan kemanusiaan, donor darah, serta bantuan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan. Berbagai kegiatan tersebut menunjukkan bahwa implementasi nilai bela negara tidak hanya dimaknai dalam konteks pertahanan militer, tetapi juga diwujudkan melalui kontribusi sosial yang memperkuat solidaritas dan kohesi sosial di masyarakat.

Sebagai salah satu organisasi masyarakat mitra Kementerian Pertahanan, FKBN memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan Program

Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN). FKBN berperan sebagai mitra pemerintah dalam menyosialisasikan nilai-nilai bela negara kepada masyarakat serta mendorong partisipasi masyarakat sipil dalam memperkuat ketahanan nasional. Melalui jaringan organisasi yang tersebar hingga tingkat daerah, FKBN menjadi salah satu organisasi yang mampu memperluas jangkauan kegiatan PKBN di berbagai komunitas masyarakat. Peran tersebut menunjukkan bahwa FKBN tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana kegiatan pembinaan bela negara, tetapi juga sebagai aktor sosial yang berkontribusi dalam memperkuat pertahanan non-militer melalui pendekatan sosial dan budaya di tengah masyarakat (Forum Kader Bela Negara, n.d.).

4.3.2 Pemuda Pemudi Bela Negara (PPBN)

Pemuda Pemudi Bela Negara (PPBN) merupakan organisasi masyarakat yang lahir dari inisiatif para alumni Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia di Rumpin, Bogor. Organisasi ini bermula dari gagasan untuk menjaga kesinambungan semangat pengabdian para kader setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan bela negara. Inisiatif pembentukan organisasi diprakarsai oleh Ary Lestari pada awal Januari 2018 sebagai upaya mempererat hubungan antarkader sekaligus mengembangkan wadah yang dapat mengorganisasi kegiatan bela negara secara lebih terstruktur di tengah masyarakat.

Pada masa awal pembentukannya, organisasi ini bernama Persatuan Kader Bela Negara dan mendapat dukungan dari pimpinan Kementerian Pertahanan, khususnya Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan serta Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara. Dukungan tersebut memberikan legitimasi awal bagi organisasi sebagai wadah kader bela negara yang berorientasi pada penguatan nilai kebangsaan serta kontribusi sosial masyarakat. Seiring perkembangan organisasi, keanggotaan tidak lagi terbatas pada alumni satu angkatan pelatihan, tetapi meluas mencakup berbagai alumni

pendidikan dan pelatihan bela negara yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertahanan. Pada momentum peringatan Hari Bela Negara tanggal 19 Desember 2020, organisasi ini secara resmi memperoleh pengesahan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan nama Pemuda Pemudi Bela Negara (PPBN). Pemilihan nama tersebut bertujuan untuk memperkuat identitas organisasi sebagai wadah partisipasi generasi muda dalam kegiatan bela negara serta mendorong keterlibatan pemuda dalam mendukung berbagai program pertahanan non-militer (PPBN, 2021).

Sebagai organisasi yang berorientasi pada pembinaan generasi muda, PPBN memiliki visi untuk mendukung pelaksanaan program bela negara yang diselenggarakan oleh pemerintah serta menjadi organisasi kader bela negara yang mampu menjadi teladan bagi generasi muda. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, PPBN berupaya merekrut kader dari berbagai latar belakang pendidikan, khususnya pelajar, mahasiswa, serta alumni pendidikan bela negara yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertahanan dan Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Melalui visi dan misi tersebut, PPBN menempatkan generasi muda sebagai aktor strategis dalam memperkuat ketahanan nasional melalui penguatan nilai kebangsaan, karakter kepemimpinan, serta kepedulian sosial. Penekanan pada nilai Jiwa, Semangat, dan Nilai-Nilai 1945 (JSN '45) juga menunjukkan upaya organisasi dalam mengintegrasikan nilai historis perjuangan bangsa dengan tantangan kebangsaan yang dihadapi generasi muda pada masa kini.

Dalam menjalankan aktivitas organisasinya, PPBN memiliki struktur organisasi yang disusun secara hierarkis pada tingkat pusat yang dipimpin oleh seorang ketua umum dan didukung oleh sekretaris jenderal, bendahara umum, serta sejumlah bidang kerja. Bidang-bidang tersebut antara lain meliputi kaderisasi, kepemudaan dan olahraga, pendidikan, sosial, hukum dan hak asasi manusia, pertahanan dan keamanan, ekologi, komunikasi digital, hubungan antar lembaga, serta kerja sama

internasional. Struktur organisasi tersebut menunjukkan upaya PPBN dalam membangun tata kelola organisasi yang adaptif serta mampu mendukung pelaksanaan berbagai kegiatan bela negara secara terkoordinasi dan berkelanjutan. Keanggotaan PPBN sebagian besar berasal dari kalangan pemuda, pelajar, dan mahasiswa yang memiliki latar belakang sebagai alumni pendidikan dan pelatihan bela negara maupun kader yang direkrut melalui institusi pendidikan formal. Hal ini menunjukkan bahwa PPBN menempatkan generasi muda sebagai basis utama gerakan organisasi dalam menyebarkan nilai bela negara di lingkungan sosialnya.

Kegiatan utama PPBN berfokus pada penguatan nilai bela negara, pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan karakter kebangsaan generasi muda. Kegiatan tersebut antara lain berupa penyelenggaraan pendidikan dan sosialisasi bela negara melalui seminar, diskusi kebangsaan, pelatihan, dan kegiatan edukatif lainnya yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya bela negara. Selain itu, PPBN juga aktif melaksanakan berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan seperti penyaluran bantuan bencana alam, bantuan sosial bagi masyarakat kurang mampu, kegiatan donor darah, serta kegiatan kesehatan masyarakat. Dalam situasi darurat seperti pandemi Covid-19, PPBN turut terlibat dalam kegiatan bantuan kemanusiaan seperti distribusi alat pelindung diri, masker, dan dukungan logistik bagi tenaga kesehatan.

Selain kegiatan sosial, PPBN juga melaksanakan kegiatan pembinaan internal kader melalui berbagai kegiatan konsolidasi organisasi, dialog kebangsaan, serta kegiatan wisata edukasi yang bertujuan meningkatkan pemahaman kader terhadap sejarah perjuangan bangsa dan nilai-nilai kebangsaan. Kegiatan tersebut menjadi sarana pembinaan kader agar mampu berperan sebagai agen perubahan dan teladan dalam menyebarkan nilai bela negara di lingkungan masyarakat.

Sebagai organisasi masyarakat mitra Kementerian Pertahanan, PPBN memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan Program Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN). Peran tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan pendidikan, sosialisasi, dan pengabdian masyarakat yang bertujuan menanamkan nilai cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta semangat bela negara kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Melalui kegiatan tersebut, PPBN tidak hanya berperan sebagai penyelenggara kegiatan sosialisasi bela negara, tetapi juga sebagai agen penggerak yang membantu memperluas jangkauan program pembinaan bela negara di berbagai komunitas masyarakat. Dengan demikian, keberadaan PPBN menunjukkan peran organisasi masyarakat dalam memperkuat pertahanan non-militer melalui pendekatan sosial, edukatif, dan partisipatif di tengah masyarakat (PPBN, 2021).

4.3.3 Generasi Muda Bela Negara (GMBN)

Generasi Muda Bela Negara Republik Indonesia (GMBN RI) merupakan organisasi masyarakat yang bergerak dalam penguatan nilai-nilai kebangsaan dan kesadaran bela negara di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda. Organisasi ini didirikan pada tanggal 14 September 2021 di Jakarta dan berkedudukan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Pembentukan organisasi ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan adanya wadah partisipasi masyarakat yang mampu menghimpun dan menggerakkan generasi muda dalam mendukung upaya bela negara melalui pendekatan sosial kemasyarakatan yang terorganisasi dan berkelanjutan. Kehadiran GMBN dimaksudkan sebagai bagian dari kontribusi masyarakat sipil dalam mendukung kebijakan pertahanan negara, khususnya dalam penguatan pertahanan non-militer melalui pembinaan kesadaran bela negara di masyarakat (GMBN RI, 2021).

Secara ideologis, GMBN berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Organisasi ini memaknai bela negara sebagai sikap dan perilaku warga negara yang

dilandasi kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia serta diwujudkan melalui pengabdian sesuai dengan kemampuan, profesi, dan peran sosial masing-masing individu. Visi GMBN adalah menghimpun, membina, dan menggerakkan potensi masyarakat secara gotong royong dalam rangka mewujudkan kedaulatan bangsa dan negara. Untuk mewujudkan visi tersebut, organisasi ini menjalankan beberapa misi, antara lain menyelenggarakan pendidikan dan pembinaan kesadaran bela negara kepada masyarakat, menumbuhkan budaya cinta tanah air dan wawasan kebangsaan, menghimpun partisipasi masyarakat sipil dalam mendukung kepentingan nasional, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan visi dan misi tersebut, GMBN menempatkan masyarakat sebagai basis utama dalam memperkuat kesadaran bela negara melalui pendekatan sosial dan kebangsaan (GMBN RI, 2021).

Dalam menjalankan aktivitas organisasinya, GMBN memiliki struktur organisasi yang disusun secara berjenjang mulai dari Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah tingkat provinsi, hingga Dewan Pimpinan Wilayah pada tingkat kabupaten dan kota. Struktur organisasi yang bersifat teritorial tersebut memungkinkan organisasi untuk menjangkau wilayah yang luas serta melaksanakan kegiatan secara terkoordinasi di berbagai daerah. Keanggotaan GMBN terbuka bagi seluruh warga negara Indonesia yang bersedia mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi. Dalam struktur keanggotaannya, GMBN mengklasifikasikan anggota ke dalam beberapa kategori seperti kader, komponen, dan anggota istimewa yang memiliki peran masing-masing dalam mendukung pelaksanaan kegiatan organisasi (GMBN RI, n.d.).

Kegiatan utama GMBN berfokus pada pembinaan kapasitas anggota serta penyebaran nilai-nilai bela negara melalui berbagai kegiatan pelatihan, edukasi, dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Berdasarkan laporan kegiatan organisasi, GMBN secara aktif menyelenggarakan berbagai pelatihan dasar yang bertujuan membentuk kader muda yang tangguh dan disiplin, seperti pelatihan dasar water rescue, pelatihan vertical rescue,

serta pelatihan dasar menembak. Kegiatan tersebut dirancang untuk membekali anggota dengan keterampilan dasar dalam menghadapi kondisi darurat maupun situasi kebencanaan sekaligus menanamkan nilai tanggung jawab, kedisiplinan, serta kerja sama sebagai bagian dari karakter bela negara. Selain kegiatan pelatihan, GMBN juga aktif melaksanakan kegiatan edukasi dan sosialisasi bela negara kepada masyarakat, khususnya generasi muda, melalui kegiatan pengenalan bela negara kepada Pramuka serta kegiatan sosialisasi di berbagai institusi masyarakat. Organisasi ini juga melakukan penguatan kelembagaan melalui pembentukan kepengurusan wilayah di beberapa daerah sebagai upaya memperluas jangkauan kegiatan bela negara di tingkat lokal (GMBN RI, 2025).

Sebagai organisasi masyarakat yang menjadi mitra Kementerian Pertahanan, GMBN memiliki peran dalam mendukung pelaksanaan Program Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN). Peran tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan edukasi, pelatihan, serta kegiatan sosial yang bertujuan menanamkan nilai-nilai bela negara kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Program yang dijalankan GMBN seperti kegiatan “Aksi Nyata Bela Negara” menjadi sarana untuk menginternalisasikan nilai bela negara melalui kegiatan praktik di lapangan. Melalui berbagai kegiatan tersebut, GMBN berperan sebagai fasilitator sekaligus penggerak masyarakat dalam memperkuat kesadaran bela negara berbasis partisipasi masyarakat. Dengan demikian, keberadaan GMBN menunjukkan kontribusi organisasi masyarakat dalam memperkuat pertahanan non-militer melalui pendekatan sosial, edukatif, dan pemberdayaan generasi muda di tingkat komunitas (GMBN RI, 2025).

VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, dapat disimpulkan bahwa organisasi masyarakat mitra Kementerian Pertahanan (FKBN, PPBN, dan GMBN) memiliki peran penting sebagai aktor sosial dalam mengoperasionalkan Program Kesadaran Bela Negara (PKBN) di tingkat masyarakat. Dalam praktiknya, organisasi masyarakat tidak hanya bertindak sebagai pelaksana program, tetapi juga sebagai mediator sekaligus pembentuk makna yang menerjemahkan konsep bela negara ke dalam praktik sosial yang kontekstual, adaptif, dan beragam.

Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa peran tersebut belum sepenuhnya didukung oleh sistem pembinaan dan dukungan struktural yang memadai dari negara. Pelaksanaan PKBN di lapangan cenderung lebih banyak bertumpu pada inisiatif dan kapasitas organisasi masyarakat, sementara dukungan dalam bentuk pembinaan berkelanjutan, penguatan kapasitas, serta fasilitasi sumber daya masih terbatas. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara beban pelaksanaan program dengan dukungan yang diberikan, sehingga keberlanjutan program sangat bergantung pada kekuatan internal masing-masing organisasi.

Di sisi lain, penelitian ini juga menunjukkan bahwa organisasi masyarakat belum sepenuhnya mampu menjaga konsistensi pelaksanaan program. Ketergantungan pada relawan, fluktuasi partisipasi anggota, serta menurunnya keterlibatan dalam kegiatan rutin menunjukkan bahwa proses pembiasaan dan penanaman nilai bela negara belum sepenuhnya terlembaga secara kuat. Hal ini

mengindikasikan bahwa nilai yang telah dipahami belum selalu diikuti oleh pola tindakan yang stabil dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa terjadi perluasan sekaligus keragaman dalam pemaknaan bela negara. Nilai bela negara berkembang menjadi bentuk-bentuk yang lebih kontekstual seperti tanggung jawab sosial, disiplin, kepedulian, kesiapsiagaan, hingga literasi informasi di ruang digital. Meskipun menunjukkan kemampuan adaptasi terhadap perkembangan sosial, kondisi ini juga memperlihatkan belum adanya kerangka pemahaman yang cukup terintegrasi untuk menjaga keseragaman arah pemaknaan. Akibatnya, bela negara berpotensi dimaknai dan dijalankan secara berbeda-beda antarorganisasi.

Dalam perspektif sosiologi pertahanan, temuan ini menunjukkan adanya pergeseran dari pendekatan yang berpusat pada negara menuju pendekatan yang melibatkan masyarakat sebagai bagian aktif dalam sistem pertahanan. Organisasi masyarakat menjadi ruang penting dalam membentuk, menyebarkan, dan mempraktikkan nilai bela negara melalui interaksi sosial dan pengalaman kolektif. Namun demikian, keterlibatan masyarakat yang cukup besar tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan penguatan sistem yang mampu mengintegrasikan peran mereka secara berkelanjutan.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa PKBN berada dalam kondisi yang belum sepenuhnya stabil. Di satu sisi, program ini berhasil mendorong keterlibatan masyarakat dan menghadirkan praktik bela negara yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Namun di sisi lain, masih terdapat keterbatasan dalam hal dukungan kebijakan, konsistensi pelaksanaan, serta keseragaman pemahaman nilai. Tanpa adanya penguatan pada aspek tersebut, pelaksanaan bela negara berpotensi berjalan secara parsial, tidak merata, dan sulit berkembang menjadi sistem sosial yang kuat dalam mendukung pertahanan negara.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, saran yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Organisasi Masyarakat (FKBN, PPBN, dan GMBN)

- Mengembangkan indikator keberhasilan kaderisasi yang menekankan pada perubahan perilaku, konsistensi keterlibatan, dan komitmen anggota.
- Memperkuat sistem evaluasi internal secara berkala guna memastikan nilai bela negara benar-benar terinternalisasi dalam praktik organisasi.
- Meningkatkan strategi komunikasi publik melalui media digital agar nilai bela negara lebih kontekstual dan mudah diterima oleh generasi muda.

2. Bagi Kementerian Pertahanan

- Memberikan dukungan yang lebih sistematis, tidak hanya administratif tetapi juga pada penguatan kapasitas metode edukasi dan komunikasi organisasi mitra.
- Mengembangkan sistem evaluasi program yang tidak hanya berbasis kegiatan, tetapi juga kualitas internalisasi nilai di tingkat organisasi dan masyarakat.
- Menyusun pedoman komunikasi bela negara yang adaptif agar tidak terjebak pada pendekatan formalistik.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

- Mengkaji perspektif masyarakat sebagai penerima program untuk melihat efektivitas penyebaran nilai bela negara.
- Menggunakan pendekatan kombinasi untuk memperkuat analisis perubahan sikap dan perilaku secara lebih terukur.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Tata Kelola Kolaboratif dalam Teori dan Praktik. *Jurnal Penelitian dan Teori Administrasi Publik*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Ardiansyah, Risnita, & Jailani, MS (2023). Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *Jurnal IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam*.
- Aria, N. (2025). The power of ideas: A constructivist reinterpretation of security in international relations. *Journal of Social Sciences and Humanities*, 2(3), 18-36.
- Arkan, N. F., & Najicha, F. U. (2024). Membangun kembali rasa nasionalisme di generasi muda. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 12(1).
- Audina, N., Supriani, A., Lestari, G., Angreselda, S., & Widyawati, S. (2026). Analisis Permasalahan Pelanggaran Nilai Pancasila Dalam Lingkungan Pendidikan Melalui Kasus Ledakan Di SMA 72 Jakarta. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 2(1), 177-183.
- Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. (2025, Februari 28). *Provinsi DKI Jakarta dalam angka 2025* (No. katalog 1102001.31; ISSN 0215-2150). Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. <https://jakarta.bps.go.id/id/publication/2025/02/28/30874e042a98939928603ee5/provinsi-dki-jakarta-dalam-angka-2025.html>
- Berger, P. L., & Luckmann, T. (1966). *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. Anchor Books.

- Borrini-Feyerabend, G. 1996. Collaboration Management of Protected Area: Tailoring the Approach to the Context. Social Policy Group IUCN. [http:// www.iucn.org/](http://www.iucn.org/) (download 12-1-2011)
- Bovaird, T., & Loeffler, E. (2012). Dari Keterlibatan ke Koproduksi: Kontribusi Pengguna dan Komunitas terhadap Hasil dan Nilai Publik. *Voluntas: Jurnal Internasional Organisasi Sukarela dan Nirlaba* , 23(4), 1119–1138. <https://doi.org/10.1007/s11266-012-9309-6>
- Demartoto, A. (2013, 10 April). *Teori konstruksi sosial dari Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Blog Dr. Argyo Demartoto, M.Si.*
- Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan. (2024). *Peran generasi muda dalam mengimplementasikan nilai dasar bela negara*. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- Ditjenpothan Kementerian Pertahanan. (2014). *Tataran Dasar Bela Negara*. Jakarta: Kementerian Pertahanan RI
- Erwinsyahbana, T., Ramlan, R., Yusrizal, M., Minin, A. R., & Syahbana, T. R. F. (2024). Strategi Pembinaan Kesadaran Bela Negara Pada Fkppi Sebagai Organisasi Kemasyarakatan Dan Komponen Pendukung Pertahanan Negara. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Pengabdian Pencerahan Bangsa*, 2(1).
- Fatmawati, F. (2011). Kemitraan Dalam Pelayanan Publik: Sebuah Penjelajahan Teoritik. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(2).
- Forum Kader Bela Negara (FKBN). 2022. *Profile Forum Kader Bela Negara*. Jakarta: Dokumen internal.
- Fung, A. (2015). Mengembalikan Partisipasi Publik dalam Tata Kelola: Tantangan Partisipasi Warga dan Masa Depan. *Public Administration Review* , 75(4), 513–522. <https://doi.org/10.1111/puar.12361>
- Generasi Muda Bela Negara Republik Indonesia (GMBN RI). 2025. *Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Kegiatan GMBN RI September 2025*. Dokumen internal organisasi.

- Generasi Muda Bela Negara Republik Indonesia (GMBN RI). 2021. *Anggaran Dasar Generasi Muda Bela Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Dokumen internal organisasi.
- Hadi, O. H. (2010). Peran Masyarakat Sipil Dalam Proses Demokratisasi. *Makara Human Behavior Studies in Asia*, 14(2), 117-129. <https://doi.org/10.7454/mssh.v14i2.674>
- Hamid, N. A., Bastari, B., Purwantoro, S. A., Almubaroq, H. Z., & Yanto, S. (2025). Optimalisasi Pemberdayaan Potensi Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Kota Bandung dalam Upaya Pertahanan Negara. *AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 4(2), 2412-2419.
- Herdiansah, A. G. (2016). Peran organisasi masyarakat (Ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam menopang pembangunan di Indonesia. *Sosioglobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, 1(1), 49-67.
- Kandek, M., & Widodo, S. (2023). Peran Karang Taruna Dalam Mewujudkan Bela Negara Di Kelurahan Krobokan Kota Semarang. *Jurnal Spirit Edukasia*, 3(02), 268-276.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembinaan Kesadaran Bela Negara*. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2017). *WIRA: Edisi Khusus 2017*. Jakarta: Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan Kesadaran Bela Negara*. Kementerian Pertahanan RI. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/268625/permenhan-no-8-tahun-2022>

- Kementerian Pertahanan RI. (2015). *Buku Putih Pertahanan*. Jakarta: Kementerian Pertahanan RI.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Mubarak, A., Ip, S., & Fis, P. I. I. (2014). Peran Ormas dalam Menjalankan Fungsi Pemerintah Bidang Pemberdayaan. In *Seminar Nasional Ut* (Vol. 23).
- Nafisah, AD, Sobah, A., Yusuf, NAK, & Hartono, H. (2022). Pentingnya penanaman nilai-nilai pancasila dan moral pada anak usia dini. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6 (5), 5041-5051.
- Nugroho, R. (2023). *Kebijakan Publik 7: Dinamika kebijakan publik, analisis kebijakan publik, manajemen politik kebijakan publik, etika kebijakan publik*. PT Elex Media Komputindo.
- Nurdin, A. (2018). Sosiologi Organisasi: Pengertian, Sejarah Lahirnya, Ruang Lingkup, Manfaat dan Metode Penelitian. *Modul 1: Sosiologi Organisasi: Pengertian, Sejarah Lahirnya, Ruang Lingkup, Manfaat Dan Metode Penelitian*.
- Pemuda Patriot Bela Negara Republik Indonesia (PPBN RI). Tanpa Tahun. *Visi dan Misi PPBN RI*. Dokumen internal organisasi.
- Pratiwi, A., Putri, A. L., Bahirah, H. I., & Syahnanda, R. (2022). Peran Masyarakat Sipil Dalam Menanggulangi COVID-19 Sebagai Ancaman Non-Militer Di Indonesia. *Publiciana*, 15(02), 54-65.
- Presiden Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015–2019*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Rahman, A., Wasistiono, S., Riyani, O., & Tahir, I. (2023). Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. *Ekonomis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.

- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4169.
- Republik Indonesia. (2013). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116.
- Siregar, PD, Teguh, G., Lindra, Administrasi, P., Akmil, P., Gatot, JJ, & Magelang, S. (2024). PERAN AKMIL MELLUI BINTERTAS GUNA MENINGKATKAN KESADARAN BELA NEGARA DALAM PERTAHANAN NIRMILITER. *JURNAL TEKNIK SIPIL PERTAHANAN* .
- Soekanto, S. (2010). *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suriata, I. N. (2019). Aktualisasi kesadaran bela negara bagi generasi muda dalam meningkatkan ketahanan nasional. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 4(1), 47-56.
- Vigoda, E. (2002). Dari responsivitas menuju kolaborasi: Tata kelola, warga negara, dan generasi berikutnya administrasi publik. *Tinjauan administrasi publik* , 62 (5), 527-540.
- Wahyudi, W. (2017). Peran Kader Bela Negara Di Kawasan Perbatasan Dalam Dinamika Hubungan Lintas Batas Negara: Studi Tentang Peran Forum Bela Negara di Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*, 7(3), 1-22.
- Weber, M. (2009). *The theory of social and economic organization*. Simon and Schuster.